



LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Pada Laporan Kinerja ini disajikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Lingkungan Strategis yang berpengaruh, Renstra Dinas, Indikator Kinerja, Capaian dan Analisis Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Strategi Pemecahan Masalah, Capaian masing-masing Indikator Kegiatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, Januari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru,

ABU YAJID BUSTAMI, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I
NIP. 19660711 198703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	5
1.3. Struktur Organisasi	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi	23
1.5 Sistematika Penyajian	28
BAB II.....	29
PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama	29
2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 (Rencana Kerja Tahun 2023)	43
BAB III.....	48
AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
3.1 Capaian Kinerja	50
BAB IV	115
PENUTUP.....	115
4.1 SIMPULAN	115
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	119

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu meningkat permintaanya sehingga semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Ketersediaan pangan sebaiknya jumlahnya mencukupi serat, bermutu baik dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Salah satu komoditas pangan utama yang paling dominan dikelola di setiap daerah di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarbaru adalah padi yang nantinya akan diolah menjadi beras sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan pangan pada saat ini dan yang akan datang harus bisa terpenuhi, oleh sebab itu perlu suatu pendekatan baru dalam perkembangan pertanian maupun perikanan, agar kebutuhan pangan yang terus meningkat dapat terpenuhi dikarenakan terus bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang.

Pembangunan dalam bidang pertanian maupun perikanan pada saat ini dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan dengan sistem agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kuantitas, produktivitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha pertanian maupun perikanan, baik yang dikelola secara mandiri maupun kemitraan. Pembangunan pertanian dan perikanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Walaupun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kendala di sektor pertanian maupun perikanan yang juga menjadi isu strategis

pada sektor tersebut, diantaranya lajunya pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian yang masih tinggi, regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia serta permodalan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada di sector pangan, pertanian maupun perikanan saat ini.

Pada setiap akhir pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan evaluasi kinerja melalui suatu hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), dimana dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian kinerja dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu bagaimana mewujudkan suatu Laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil kinerja suatu organisasi pemerintahan.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Struktur dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Banjarbaru, dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan dalam Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

- a. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Ketahanan Pangan serta Bidang Penyuluhan;
- d. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat terhadap terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian adalah sebagai berikut :

1.3.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan dan bidang Penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1.2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan ;
- c. Sub Bagian Keuangan

1.3.1.3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- 1.3.1.3.1. Seksi Mutu Keamanan Pangan ;
- 1.3.1.3.2. Seksi ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 1.3.1.3.3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

1.3.1.4. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

- 1.3.1.4.1. Seksi Tanaman Pangan ;
- 1.3.1.4.2. Seksi Pertanian dan Perkebunan ;

1.3.1.5. Bidang Perikanan, terdiri dari :

- 1.3.1.5.1. Seksi Budidaya dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- 1.3.1.5.2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;

1.3.1.6. Bidang Peternakan, terdiri dari :

- 1.3.1.6.1. Seksi Budidaya, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- 1.3.1.6.2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

1.3.1.7 Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

- 1.3.1.7.1 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan dan Petani ;
- 1.3.1.7.2. Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan ;

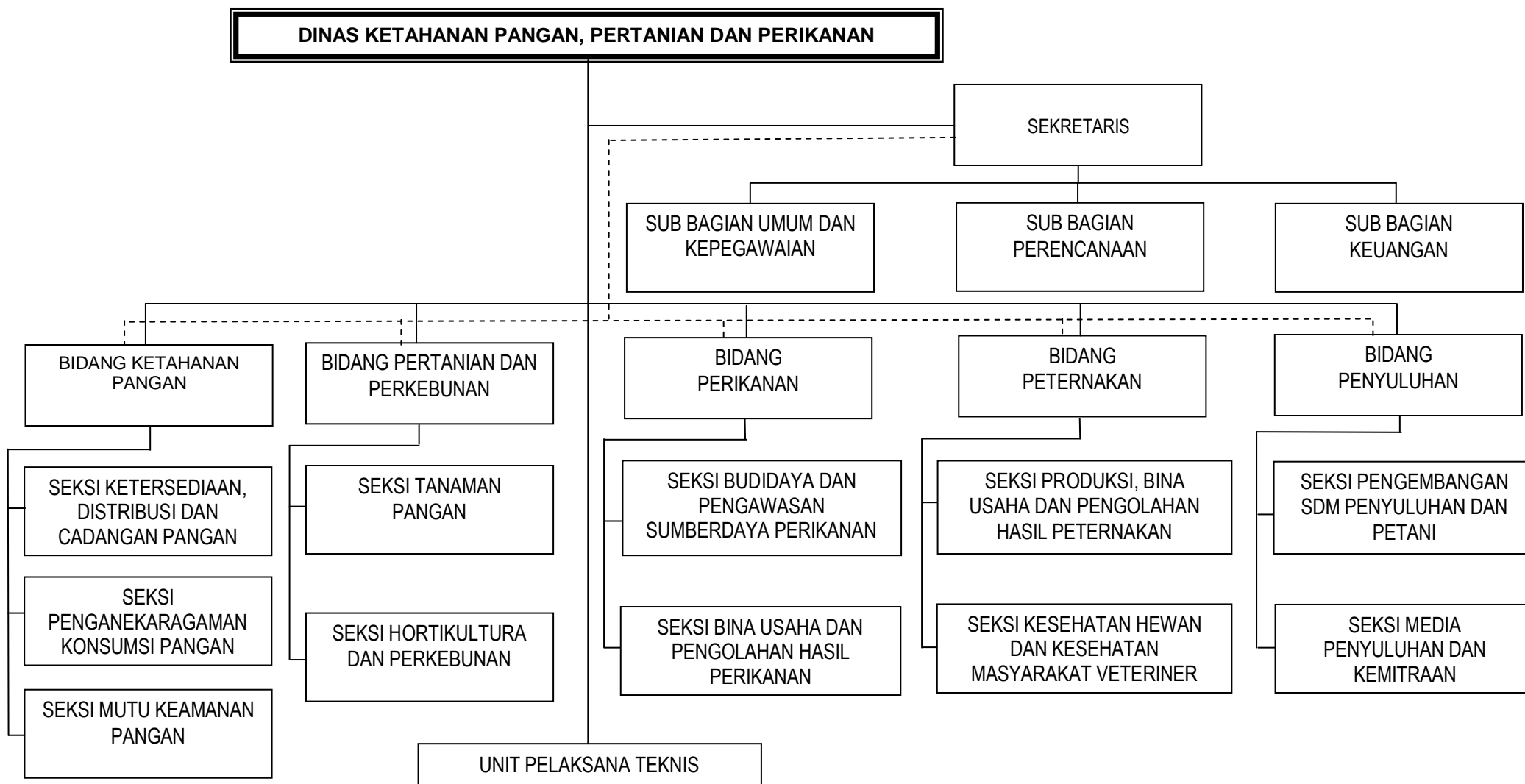
1.3.2. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari

- a. UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT);
- b. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH);
- c. UPT BPP Liang Anggang ;
- d. UPT BPP Landasan Ulin ;
- e. UPT BPP Banjarbaru ;
- f. UPT BPP Cempaka ;
- g. UPT Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BPTPKH)

1.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan tersebut di bawah :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU**



Keterangan : — : Garis Komando - - - - : Garis Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2023 didukung oleh 167 orang personil, ASN terdiri dari PNS sebanyak 86 orang dan PPPK sebanyak 28 orang, Non ASN sebanyak 42 orang dan Pegawai Pusat/Provinsi yang diperbantukan sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) | = 86 orang |
| terdiri dari : | |
| 1. Pejabat Struktural | = 30 orang |
| 2. Pejabat Fungsional | = 56 orang |
| 2). PPPK | = 28 orang |

B. Pegawai Non ASN = 42 orang

Terdiri dari :

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) | = 1 orang |
| 2) Tenaga Kontrak | = 13 orang |
| 3) Non Register | = 28 orang |

C. Pegawai Pusat/Provinsi yang diperbantukan

- | | |
|--|-----------|
| 1). Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pangan | = 2 orang |
| 2). Penyuluh Perikanan | = 5 orang |
| 3). THL – TB Perikanan | = 4 orang |
| 4) Pengawas Benih Tanaman | = 0 orang |

Tabel. 1.
KEADAAN PEGAWAI DKP-3 TAHUN 2022

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD	0	0	I/a	0	0	non eselon	22	45
2	SLTP	0	0	I/b	0	0	I.a	0	0
3	SLTA	5	2	I/c	0	0	I.b	0	0
4	D-I	0	0	I/d	0	0	II.a	0	0
5	D-II	0	0	II/a	0	0	II.b	1	0
6	D-III	2	2	II/b	0	0	III.a	1	0
7	D-IV	1	1	II/c	1	0	III.b	2	3
8	S-1	15	36	II/d	2	2	IV.a	2	4
9	S-2	7	11	III/a	4	3	IV.b	3	3
10	S-3	0	0	III/b	4	7	V.a	0	0
11	Pendidikan Profesi	1	3	III/c	2	6	V.b		
12				III/d	10	24			
13				IV/a	4	11			
14				IV/b	3	2			
15				IV/c	1	0			
16				IV/d	0	0			
17				IV/e	0	0			
	JUMLAH	31	55	JUMLAH	31	55	JUMLAH	31	55

Sumber data diambil dari Aplikasi SIMPEG Kota Banjarbaru

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan (*Threat*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi meliputi :
 - a Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan penanganan daerah rawan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
 - b Pengetahuan dan keterampilan petani, peternak, petani ikan dan pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru relatif masih sederhana dan mengandalkan kondisi alam;
 - c Permodalan petani pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru belum memasuki akses perbankan;
 - d Pengolahan hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar daerah belum diberdayakan secara optimal;
 - e Investor dalam bidang agribisnis belum berkembang.
2. Peluang (*Opportunity*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencapai atau mampu melampaui pencapaian dalam mencapai visi dan misi meliputi:
 - a Dukungan dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Legislatif dalam pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terutama untuk pengolahan hasil (agroindustri);
 - b Akses transportasi dan informasi yang memadai untuk berhubungan dengan kabupaten dan kota lainnya;
 - c Adanya Lembaga Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi yang berbasis pertanian, peternakan dan perikanan baik negeri maupun swasta Kota Banjarbaru;
 - d Permintaan terhadap produk agribisnis cukup tinggi terlebih dengan adanya permintaan terhadap hasil pertanian yang organik;
 - e Letak Kota Banjarbaru yang strategis untuk memasarkan produk komoditi agribisnis yang dihasilkan.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut diatas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru, karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru yang menjadi ruang lingkup SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tidak terlepas dari Tantangan (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi selama tahun 2023 yang kemudian diimplementasikan menjadi visi dan misi, kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan.

Tujuan tersebut lebih lanjut diinterpretasikan menjadi sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut maka dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru.

Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari program tersebut diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai ujung tombak dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya alamnya sendiri maupun sumberdaya manusianya sebagai pelaksana.

3. *Permasalahan*

Pembangunan periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2016-2021). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran

permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta penanganan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2021-2026, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertambahan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk baik karena kelahiran atau adanya perpindahan penduduk, menyebabkan terjadi kenaikan permintaan atas produk pangan. Tingginya kebutuhan akan bahan pangan dan produk pangan menyebabkan permintaan semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan persediaan bahan pangan dan produk pangan yang berdampak kepada terjadinya kerawanan pangan.

Ditambah lagi pola pangan yang sama terutama kebutuhan akan beras yang semakin tinggi menyebabkan tingginya permintaan beras di masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan diversifikasi akan bahan pangan dan produk pangan.

2. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

- a. Konversi lahan yang tidak terkendali

Keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian/perkebunan, dan perikanan yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah dan perkebunan lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai areal pembangunan perumahan/pemukiman, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada pertanian/perkebunan, dan perikanan.

b. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan sector pangan, pertanian dan perikanan yang ada di Kota Banjarbaru sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan ada yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup.

Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

c. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

d. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Kondisi kepemilikan lahan yang sering bermasalah antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian/perkebunan untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum,

(2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah dan lahan perkebunan/ karet. Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang ada maupun pembukaan lahan baru.

3. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah sistem pengairan atau jaringan irigasi. Ketiadaan waduk di Banjarbaru membuat sistem pengairan mengandalkan pada kondisi alam. Selain itu, prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani maupun jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat meningkatkan produksi dan menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua

pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga

perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Sistem perbibitan diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

5. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian/perkebunan yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk

mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing instansi. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan. Pengembangan pertanian/perkebunan dan perikanan memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui Formulasi Kebijakan.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Pemerintah daerah berupaya untuk mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan.

6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- a. Kelembagaan petani, peternak dan petani ikan yang belum mempunyai posisi yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian masih ada yang orientasinya hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/keompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

- b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius

dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan.

c. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan.

Secara umum, mereka beranggapan bahwa sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

7. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah. Namun

demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

1.4.1.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu *“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”*.

Penjelasan Visi

Banjarbaru Juara Terdiri Atas tiga Aspek Penting Yaitu :

- a. Maju adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
- b. Agamis adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang agamis, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- c. Sejahtera adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik.

1.4.1.2. Misi

Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang langsung berkenaan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah Misi 2 sebagai berikut :

“Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”

Di wujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara

meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup

3. TUJUAN DAN SASARAN

a) Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mendukung tujuan pada RPJMD adalah

“Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”

Begitu pula dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Meningkatnya Sumberdaya Perikanan.
5. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan
6. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan
7. Meningkatnya Penyediaan Prasarana Pertanian
8. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru
9. Meningkatnya Kelembagaan Penyuluhan dan Petani

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan

3. Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun
4. Peningkatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar
5. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya
6. Peningkatan sumberdaya perikanan
7. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan
8. Peningkatan pengembangan sarana pertanian/peternakan
9. Peningkatan populasi ternak
10. Peningkatan penyediaan prasarana pertanian
11. Peningkatan status kesehatan hewan
12. Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani

Kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
3. Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal
4. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun
5. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
6. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota
7. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
8. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
9. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota
10. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan

11. Pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum
12. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
13. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
14. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
15. Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
16. Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan tanaman skala kecil.
17. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
18. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian
19. Pembebasan penyakit hewan menular dan zoonosis
20. Penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
22. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
23. Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian

ISU STRATEGIS SKPD

Isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah ;

“Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Penetapan isu strategis tersebut didasarkan kepada beberapa kondisi daerah saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan karena tingginya alih fungsi lahan ;
2. Kelompok Tani sebagian besar belum memiliki badan hukum ;

3. Minat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan semakin berkurang ;
4. Sumber daya aparatur yang belum berkarakter dan berjiwa melayani ;
5. Daya saing produk rendah ;
6. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan ;
7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan .

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi , isu strategis organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Memuat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Capaian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV

BAB IV. PENUTUP

Memuat simpulan dan strategi peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wali Kota Banjarbaru. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh Bidang dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Esselon II berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta dengan targetnya.

Untuk lebih jelasnya Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dapat dilihat pada bagian Lampiran dari Laporan Kinerja ini.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja menyajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru ada 5 (lima) Sasaran Strategis yang digunakan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang disertai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk kesehatan. Kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Konsumsi pangan tersebut perlu memenuhi satu standar ukuran baik kualitas maupun kuantitasnya termasuk komposisinya yang dikenal dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Dalam penerapannya di masyarakat, menu yang mengikuti PPH dikenal dengan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA.

Untuk Sasaran Strategis Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama yang digunakan yaitu Skor PPH Konsumsi, yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90,30

Sasaran Strategis Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat ini didukung dengan Sasaran Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah	Persentase cakupan pangan yang tersalurkan	80%
2.	Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kota	Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah	0,036%
3.	Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Angka konsumsi pangan	1.790 Kkal/perka pita/hari
4.	Peningkatan keamanan pangan melalui pengujian PSAT	Persentase rekomendasi PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang diterbitkan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 939.948.000,-
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.412.638.000,-
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 543.843.600,-
4. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 215.652.400,-

SEKSI MUTU KEAMANAN PANGAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya legalisasi PSAT	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina	1 dokumen
2.	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 20.000.000,- |
| 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 195.652.400,- |

SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dokumen
2.	Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita per tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dokumen
3	<p>Terlaksananya pembinaan kelompok P2I dan UMKM</p> <p>Terlaksananya bantuan bibit tanaman, sayuran, toga dan pupuk kandang</p> <p>Terlaksananya lomba B2SA dan Lomba Kelompok P2L</p>	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp. 103.685.200,-
2. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp. 49.999.800,-
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 493.843.800,-

SEKSI KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1..	Tersedianya informasi neraca bahan makanan (NBM)	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	1 laporan
2.	Terlaksananya monitoring stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen
3.	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	25 ton

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp. 48.450.000,-
2. Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 891.498.000,-
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 1.308.952.800,-

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran ini dipilih karena Sektor Perikanan juga merupakan salah satu sektor unggulan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dalam upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani bagi masyarakat Kota Banjarbaru.

Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya ini Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, dimana pada tahun 2023 target nya sebesar 405,54 ton. Sasaran ini didukung dengan Sasaran Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

BIDANG PERIKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Usaha pembudidaya ikan skala kecil	Persentase Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah	10 %
2.	Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air	Persentase sumberdaya perikanan yang dapat diusahakan (kawasan)	1 %
3.	Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah produksi usaha poklhasar yang dinyatakan berkualitas dan aman	118,6 ton
4.	Peningkatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Jumlah angka konsumsi (kg/kapita/tahun)	51 (kg/kapita /thn)

Kegiatan	Anggaran
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp. 1.674.888.600,-
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota	Rp. 23.190.000,-
3. Pembinaan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp. 69.119.000,-
4. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Rp. 447.099.500,-

SEKSI BUDIDAYA DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya bimtek, pembinaan dan monev	Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5 kelompok
2.	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.674.888.600,-
2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Rp. 23.190.000,-

SEKSI BINA USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya bimtek bagi poklaksar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	2 Unit
2.	Terlaksananya pembinaan calon poklaksar	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	132,2 Ton
3.	Terlaksananya pemberian fasilitas usaha pengolahan ikan bagi poklaksar	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	3 Pelaku Usaha

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp. 69.119.000,-
2. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.000.000,-
3. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 392.099.500,-

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan

Sarana pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, karena kebutuhan pangan khususnya padi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah termasuk Kota Banjarbaru, sehingga pengembangan sarana pertanian ini akan selalu ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator yaitu Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi), dengan target 7.082,69 ton. Sasaran ini didukung dengan Sasaran Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Luas lahan yang digarap	30 ha
2.	Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik tanaman	Persentase cakupan pemanfaatan SDG tanaman	56%
3.	Peningkatan pengembangan prasarana	Persentase prasarana	5 %

	pertanian	pertanian yang ditingkatkan	
		Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan	10 %
		Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan	0,0009%

Kegiatan**Anggaran**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Rp. 6.091.143.000,- |
| 2. Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. 5.197.011.400,- |

SEKSI TANAMAN PANGAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 Laporan
2.	Terlaksananya koordinasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 laporan

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp. 90.000.000,-
sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Rp. 4.822.011.500,-
3. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp. 6.001.143.000,-

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Populasi Ternak

Sasaran ini dipilih karena Sektor Peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kalimantan Selatan termasuk juga Kota Banjarbaru yang terus didorong untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi daerah penyedia ternak. Untuk meningkatkan sector peternakan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan populasi ternak, karena ternak juga merupakan kebutuhan pangan selain padi dalam memenuhi protein hewani.

Untuk Sasaran Strategis ini Indikator yang digunakan adalah Jumlah Populasi Ternak dengan target sebesar 2.879.000 ekor . Sasaran ini didukung dengan Sasaran Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

BIDANG PETERNAKAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas bibit ternak	Persentase jumlah kelahiran ternak yang berkualitas	45%
2.	Peningkatan pengembangan ternak	Persentase ternak bantuan yang berproduksi	65 %
3.	Peningkatan pelayanan penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak	Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani	100%
4.	Peningkatan pembinaan tempat pemotongan (tempat pemotongan hewan dan tempat pemotongan unggas)	Persentase tempat pemotongan yang di bina	10%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.953.138.000,-
2.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	343.384.000,-
4.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	301.700.000,-

SEKSI BUDI DAYA, BINA USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 ekor

Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp.	3.953.138.000,-

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	4 laporan

2.	Terlaksananya pengobatan pada hewan/ternak	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4 laporan
3.	Terlaksananya pengambilan sampel produk asal hewan	Jumlah penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	4 laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp. 44.430.000,-
2.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 298.954.000,-
3.	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Rp. 301.700.000,-

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani

Kelembagaan Penyuluh dan petani merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian, karena penyuluh dan petani adalah ujung tombak agar produktivitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Kelembagaan penyuluh dan petani diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan.

Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator utama yaitu Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas/score, dengan target 68 %. Sasaran ini didukung dengan Sasaran Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

BIDANG PENYULUHAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani	5 unit

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.110.845.500,-

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PENYULUHAN DAN PETANI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit
2.	Terlaksananya fasilitasi pembentukan badan hukum milik kelompok tani	Jumlah badan usaha milik petani yang dibentuk	3 unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp. 399.540.000,-
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Rp. 199.999.900,-

SEKSI MEDIA PENYULUHAN DAN KEMITRAAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyediaan sarpras media informasi penyuluhan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	16 unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.079.590.000,-

2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 (Rencana Kerja Tahun 2023)

Untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.642.221.070
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.206.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.636.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.570.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.481.925.050
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.433.365.050
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.560.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKDP	25.000.000
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	30.868.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.868.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.872.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.913.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.959.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	636.166.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000
	Pengadaan mebel	49.860.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	620.418.420
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.218.420
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.222.765.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.775.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.800.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.330.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	940.880.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.980.000
	URUSAN KETAHANAN PANGAN	2.896.429.600
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	939.948.000
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	48,450,000
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	891.498.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.412.638.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	103.685.200
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.308.952.800
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	543.843.600
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	49.999.800
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	493.843.800
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	215.652.400
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	215.652.400
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	195.652.400
	URUSAN PERTANIAN	19.649.921.700
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.670.980.800
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.091.143.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	90,000,000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.001.143.000

	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	144,700,000
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	144,700,000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Lain	5.035.138.000
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.035.138.000
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	399.999.800
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPT BTPKH)	399.999.800
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	368,880,000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Pengelolaan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B	374.999.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4.822.011.500
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	671.084.000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	343.384.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	44,430,000
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	298.954.000
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	301.700,000
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	301,700,000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten /Kota	26.000.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium (UPT BTPKH)	26.000.000
7	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	2.110.845.500
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.110.845.500
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	399.540.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	431.715.600

	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.079.590.000
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	199.999.900
	URUSAN PERIKANAN	3.046.582.750
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.507.174.250
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.674.888.600
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.674.888.600
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	832.285.650
	Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan (UPT PPBAT)	832.285.650
9	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.190.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	23.190.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	23.190.000
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	516.218.500
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	69.119.000
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil	69.119.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam (satu) Daerah Kab/Kota	447.099.500
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	55,000,000
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	392.099.500
JUMLAH ANGGARAN		40.450.809.520

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input, output dan outcome. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi dan merupakan suatu rencana yang dibuat pada awal tahun anggaran, dan selanjutnya pada akhir tahun akan dibandingkan dengan realisasinya yang merupakan pencapaian dari hasil pelaksanaan kinerja kegiatan, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan jika ada maupun keberhasilan yang dicapai, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Hasil Pengukuran kemudian dikategorisasikan ke dalam 4 (empat) kategori pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel.2
Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1.	Nilai > 90 – 100	AA (sangat memuaskan)
2.	Nilai > 80 – 90	A (memuaskan)
3.	Nilai > 70 – 80	BB (sangat baik)
4.	Nilai > 60 – 70	B (Baik)
5.	Nilai > 50 – 60	CC (Cukup/memadai)
6.	Nilai > 30 – 50	C (kurang)
7.	Nilai > 0 – 30	D (sangat kurang)

3.1 Capaian Kinerja Eselon II

Analisis atas tingkat pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,30	90,20	99,89%	AA (sangat memuaskan)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	405,54 ton	450,85 ton	111,17 %	AA (sangat memuaskan)
3.	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian /Pernakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7.082,69 ton	4.525,81	63,90%	B (Baik)
4	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2.879.000 ekor	2.867.877 ekor	99,61 %	AA (sangat memuaskan)
5.	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas (score)	68 %	68,13 %	100,19%	AA (sangat memuaskan)

Sumber data diolah DKP-3 Tahun 2023

3. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Adapun evaluasi kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk kesehatan. Kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (kilogram/kapita/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kapita/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kapita/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain. Skor PPH didapatkan melalui perhitungan berikut :

$$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi} \times \text{Bobot masing-masing kelompok pangan}$$

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan zat gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Analisis konsumsi pangan level kabupaten/kota berdasarkan data Susenas 2023 menggunakan Angka Kecukupan Energi (TKE)

anjuan sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein (TKP) 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG tahun 2018; Permenkes 28/2019).

TKE = perbandingan antara total konsumsi energi penduduk terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kap/hari x 100%

TKP = perbandingan antara total konsumsi protein penduduk terhadap Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kap/hari x 100%

Pencapaian sasaran Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan indicator Skor PPH Konsumsi untuk target dan realisasi nya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Scoring	90,30	90,2	99,98 %

Berdasarkan Tabel 4 diatas, indicator kinerja Skor PPH Konsumsi pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 90,30 dan terealisasi sebesar 90,20 atau dengan capaian kinerja sebesar 99,98 % dengan kategori capaian AA (sangat memuaskan). Skor PPH yang dihasilkan dari perhitungan data Susenas 2023 sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan karena beberapa hal diantaranya :

1. Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) kontribusi umbi-umbian masih rendah, beras dan terigu kelompok padi-padian mendominasi.
2. Stigma yang selama ini berkembang dimasyarakat yaitu **tidak kenyang kalau tidak makan nasi.**

3. Harga pangan daging ruminansia dan unggas yang lebih mahal dampak dari inflasi yang terjadi.

Walaupun terjadi penurunan skor PPH namun pola konsumsi pangan masyarakat Kota Banjarbaru sudah semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan yaitu menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai diversifikasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada gen z dan milenial khususnya para pelajar SMP dan SMA yang ada di Kota Banjarbaru, serta masyarakat yang tergabung pada pokmas karang taruna yang ada di Kota Banjarbaru sebagai perpanjangan tangan Dinas dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan skor PPH agar semakin mendekati ideal atau sempurna (100).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari score pangan (dietary csore) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi score PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Hasil perhitungan Score PPH Kota Banjarbaru tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.
SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL TAHUN 2023
KOTA BANJARBARU

No.	Kelompok pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Skor PPH
		Berat Pangan Gr/kapita/hari	Kkal/kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	
1.	Padi-padian	281.3	1,085	51.6	51.7	0.5	25.8	25.8	25.0	25.0
2.	Umbi-umbian	38.7	43	2.0	2.0	0.5	1.0	1.0	2.5	1.0
3.	Pangan Hewani	176.7	405	19.3	19.3	2.0	38.5	38.6	24.0	24.0
4.	Minyak dan Lemak	28.8	259	12.3	12.3	0.5	6.1	6.2	5.0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	1.6	9	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	1.0	0.2
6.	Kacang-kacangan	17.9	58	2.8	2.8	2.0	5.5	5.6	10.0	5.6
7.	Gula	20.9	79	3.8	3.8	0.5	1.9	1.9	2.5	1.9
8.	Sayur dan Buah	221.7	116	5.5	5.5	5.0	27.5	27.6	30.0	27.6
9.	Lain-lain	101.4	50	2.4	2.4	-	-	-	-	-
	Total		2.105	100,0	100,2		106,6	106,8	100,0	90,2

Keterangan : data diolah dengan Aplikasi Harmonisasi Data Susenas tahun 2023

Dari tabel 5 diatas terlihat untuk Kota Banjarbaru skor PPH sebesar 90,2 dengan konsumsi energi sebesar 2.105 (100,2% AKE). Angka 90,2 ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kota Banjarbaru sudah semakin beragam dan berimbang dan sudah mendekati skor maksimal (100).

Adapun situasi dan pola komsumsi pangan penduduk Kota Banjarbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6. Analisis Situasi dan Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2023

No.	Kelompok Pangan	Rata-rata		Kontribusi Pangan Strategis		
		gr/hari	Kg / tahun	Jenis Pangan	Kg / tahun	%
1.	Padi-padian	281.3	102.7	Beras	84.0	81.8
2.	Umbi-umbian	38.7	14.1	Singkong	9.7	68.8
3.	Pangan Hewani	176.7	64.5	Telur	10.2	15.8
4.	Minyak dan Lemak	28.8	10.5	Minyak Lainnya	0.5	4.8
5.	Buah/Biji Berminyak	1.6	0.6	Kemiri	0.2	33.3
6.	Kacang-kacangan	17.9	6.5	Kacang kedelai	6.0	95.2
7.	Gula	20.9	7.6	Gula Pasir	6.9	90.8
8.	Sayur dan Buah	221.7	80.9	Sayur	45.0	55.6
9.	Lain-lain	101.4	37.0	Minuman	33.7	91.1

Keterangan : data diolah dengan Aplikasi Harmonisasi Data Susenas tahun 2023

Situasi dan Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2023 masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama konsumsi beras yang masih tinggi yaitu 84 kg/kap/tahun atau 230,1 gram/kap/hari dari total 102,7 kg/kap/tahun. Untuk konsumsi singkong pada kelompok umbi-umbian tergolong tinggi walaupun di angka yang masih cukup rendah yaitu 9,7 kg/kap/tahun. Kondisi ini terjadi karena adanya suatu **stigma** yaitu karena kurangnya pengetahuan dalam

diri seseorang terkait dengan suatu hal, seperti stigma tidak kenyang kalau tidak makan nasi.

Kelompok pangan hewani konsumsi penduduk terbanyak pada konsumsi telur dibandingkan dengan konsumsi daging ruminansia dan unggas yaitu sebesar 10,2 kg/kap/tahun. Hal ini berkaitan dengan harga pangan daging ruminansia dan unggas lebih mahal dibandingkan dengan harga telur juga kemudahan dalam akses baik ketersediaan maupun keterjangkauan.

Pada kelompok sayur dan buah, penduduk Banjarbaru masih rendah dalam mengkonsumsi buah dibandingkan dengan konsumsi sayur yaitu hanya sebesar 35,9 kg/kap/tahun. Hal ini disebabkan karena memang secara keseluruhan masyarakat Indonesia malas mengkonsumsi buah termasuk juga masyarakat Kota Banjarbaru. Dilansir dari Suara.Com pada Desember 2020 saat pandemi Covid-19 melanda ternyata 9 dari 10 orang Indonesia jarang makan sayur dan buah, padahal banyak konsumsi buah dan sayur sangat berguna untuk kesehatan tubuh.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

Tabel 7. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skoring	92,2	102,22 %	91,7	101,61 %	90,2	99,89 %

Berdasarkan tabel 7 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2022 adalah sebesar 91,7, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 90,2 terjadi penurunan, hal ini antara lain disebabkan oleh pola konsumsi penduduk terutama konsumsi beras yang semakin meningkat setelah adanya pandemi.

Konsumsi beras per kapita, tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu dari 211,6 gram/kapita/hari (77,2 kg/kapita/hari) menjadi 230,1 gram/kapita/hari (84,0 kg/kapita/hari). Konsumsi kacang-kacangan mengalami penurunan dari 6,6 kkal/kapita/hari menjadi 5,6 kkal/kapita/hari. Serta konsumsi gula juga mengalami penurunan sebesar 6,1 kkal/kapita/hari. Penurunan konsumsi beberapa kelompok pangan tersebut akhirnya juga berpengaruh pada skor PPH.

Padahal tahun 2023 kegiatan sosialisasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan semakin gencar dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat kota Banjarbaru tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi mereka dalam kehidupan sehari-hari, selain itu pula semakin meningkatnya ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru, sehingga kemampuan daya beli juga meningkat, terutama daya beli terhadap kebutuhan bahan pangan pokok keluarga, selain itu disebabkan pula masyarakat kota Banjarbaru sudah mulai selektif dalam membeli bahan pangan untuk di konsumsi, sehingga bahan pangan yang dibeli sudah memperhatikan kuantitas dan kualitas gizinya serta keberagamannya. Penurunan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2023 sehingga harga pangan juga ikut naik dan mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skoring	90,2	99,98	91,5	89,7	86,2	88,1

Berdasarkan Tabel 8 diatas, realisasi indikator kinerja Skor PPH Konsumsi Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar 90,2 (dengan capaian kinerja 99,98%) adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa Kota/Kabupaten yang bersanding wilayah, diantaranya dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tanah laut (sebesar 89,7), realisasi Kota Banjarmasin (sebesar 86,2) dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan (sebesar 88,1).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Nasional

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Renstra Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skoring	90,2	99,98	90,30	94,0

Berdasarkan Tabel 9 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Score PPH Konsumsi” Tahun 2023 adalah 90,2 dengan capaian kinerja 99,98%, jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 maka baru tercapai 99,98 % dan jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 94,0 , maka capaiannya sebesar 95,96%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Program Penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 7,71 %. Efisiensi ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran. Pada Tabel 5 terlihat realisasi

Capaian kinerja adalah sebesar 99,98% dan pada Tabel 10 terlihat realisasi capaian anggaran sebesar 92,27 % pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 2.896.429.600,- terealisasi sebesar Rp. 2.672.645.600 atau dengan capaian 92,27% sehingga terjadi efisiensi 7,71%.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi, diantaranya penyuluhan, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan gizi masyarakat yang dikenal dengan penyuluhan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), Kegiatan hidroponik Untuk Pengembangan Pangan yang tujuannya juga untuk peningkatan gizi masyarakat yang ditujukan kepada Kelompok Masyarakat Karang Taruna yang tersebar di wilayah Kota Banjarbaru.

Selain program tersebut diatas terdapat pula Kegiatan pendukung lainnya yaitu dana inflasi untuk peningkatan kualitas gizi keluarga bagi keluarga yang terdata tidak bisa makan lengkap 2x sehari dengan lokus masyarakat Kelurahan Palam Kota Banjarbaru.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat :

- a. Meningkatkan pemahaman kepada sebagian besar masyarakat Kota Banjarbaru melalui penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang makanan sehat dan bergizi, sehingga mereka mau dan mulai selektif dalam membeli dan menyediakan bahan pangan bagi diri dan keluarganya dengan lebih memperhatikan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

- b. Memberikan bantuan kepada pokmas karang taruna berupa hidroponik agar tersedia pangan disekitar rumah.
- c. Meningkatkan peran dari Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan B2SA dan bimbingan-bimbingan teknis kepada kader pangan dan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

ANALISIS KEBERHASILAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap capaian indikator Skor PPH Konsumsi adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman sebagian besar masyarakat Kota Banjarbaru tentang makanan sehat dan bergizi, sehingga mereka mulai selektif dalam membeli dan menyediakan bahan pangan bagi diri dan keluarganya dengan lebih memperhatikan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
- b. Adanya perubahan data yang biasanya menggunakan data primer namun tahun 2023 sesuai dengan Perbadan No 11 tahun 2023 tentang PPH bahwa perhitungan Skor PPH menggunakan data Susenas tahun 2023.
- c. Peran serta dari Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, edukasi pola konsumsi B2SA dan bimbingan-bimbingan teknis kepada kader pangan dan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain karena menggunakan data susenas 2023 sehingga harus menunggu rilis datanya pada bulan Oktober.

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengetahui pola konsumsi penduduk pada setiap wilayah atau kelurahan perlu anggaran yang besar dan kajian lebih lengkap.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja Skor PPH Konsumsi pada Tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.896.429.600,- terealisasi sebesar Rp. 2.672.645.600 atau dengan capaian 92,27% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Tabel Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.896.429.600,-	2.672.645.600	223.784.000	92,27
	Jumlah	2.896.429.600,-	2.672.645.600	223.784.000	92,27

Pada Tabel 10 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat adalah sebesar Rp. 2.896.429.600,- dan realisasi sebesar Rp. 2.672.645.600 dengan capaian 92,27 %.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat di dukung dengan Kinerja Esselon III dan Esselon IV, dengan rincian sebagai berikut :

3.2 Capaian Kinerja Esselon III

3.2.1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Pada Bidang Ketahanan Pangan (Esselon III) ada 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang ingin di capai, yaitu :

1. Sasaran Kegiatan Peningkatan Penyaluran Pangan Pokok sesuai Dengan kebutuhan Daerah.

Sasaran ini dimaksudkan agar Cadangan pangan yang disediakan pemerintah melalui DKP3 dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan. Cadangan pangan pemerintah yang disalurkan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam, rawan pangan yang diakibatkan oleh tingginya inflasi daerah, Lembaga Sosial dan Pendidikan yang mengalami kekurangan Pangan.

2. Sasaran Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota.
3. Sasaran kegiatan Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
4. Sasaran Kegiatan Peningkatan keamanan pangan melalui pengujian PSAT.

Keamanan pangan merupakan salah satu dari hak azasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1992 yang disampaikan oleh Badan PBB yang menangani masalah Pangan yang aman merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan segar dan penjaminan keamanan pangan khususnya PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang akan di konsumsi.

Untuk Realisasi Capaian Kinerja Esselon III pada Bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 35. Realisasi Capaian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	capaian
1.	Peningkatan Penyaluran Pangan pokok sesuai dengan kebutuhan Daerah	Persentase Cakupan pangan yang tersalurkan	%	25	26,93	107,7%
2.	Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kota	Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah	%	0.036	0.568	1577,8%
3	Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Angka konsumsi pangan	Kkal/perkapi ta/hari	1792.0	2,105	117,5%
4	Peningkatan keamanan pangan melalui pengujian PSAT	Persentase rekomendasi PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang diterbitkan	%	100	100	100%

Dari Tabel 35 di atas, dapat dilihat dari 4 (empat) sasaran kegiatan Bidang Ketahanan Pangan, semua indikator dapat tercapai .

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN :

1. Menggencarkan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Simbang dan Aman) serta penganjuran gerakan makan buah kepada kaum milenial dan gen z
2. Sosialisasi kepada masyarakat atau RT/Kelurahan agar masyarakat mengetahui bahwa ada beras cadangan pangan pemerintah kota banjarbaru yang disiapkan apabila terjadi rawan pangan akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran, puting beliung dan juga untuk lembaga pendidikan dan lembaga sosial. Tentunya dengan melibatkan ketua2 RT, Lurah dan Camat setempat.
3. Pengadaan/pembelian CPP tetap diupayakan pada setiap tahun dianggarkan untuk kesinambungan beras CPP Kota Banjarbaru di Gudang Bulog.
4. Pengambilan dan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dilakukan secara kualitatif menggunakan metode rapid tes kit (sebagai screening awal) dan secara kuantitatif yaitu dengan metode uji laboratorium.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi :

- Rilis data Susenas 2023 pada triwulan IV sehingga perhitungan dan analisisnya skor PPH juga diakhir TW IV.
- Sering terjadi penundaan pendistribuan cadangan pangan apabila musim hujan.
- Kurangnya kapasitas kemampuan petugas dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan maupun pengambil contoh (kurangnya petugas yang bersertifikat dibidangnya).

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penambahan petugas perhitungan dan analisis data skor PPH.
2. Mengikutsertakan pelatihan/bimbingan teknis bagi petugas perhitungan dan analisis data skor PPH
3. Kerja sama yang baik antara pihak Kelurahan, Kecamatan dengan DKP3 serta pihak BULOG sebagai pihak yang penyelenggaraan CPP.

4. Harus ada sarana angkutan yang baik untuk pendistribusian cadangan pangan, apabila terjadi hal yang mendesak.
5. Perlu penambahan SDM untuk menangani kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota Banjarbaru.
6. Mengikutsertakan pelatihan/bimbingan teknis bagi petugas pengawas keamanan pangan maupun petugas pengambil contoh untuk meningkatkan kapasitas serta pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya.

3.3 Capaian Kinerja Eselon IV

Realisasi capaian kinerja Eselon IV yang mendukung Bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 36. Realisasi Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target	Realisasi	capaian
1.	Tersedianya informasi neraca bahan makanan (NBM)	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	laporan	1	1	100%
2.	Terlaksananya monitoring stok , pasokan dan harga pangan	pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	dokumen	1	1	100%
3	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	ton	25	98	392%
4	Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	dokumen	1	1	100%
5	Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita per tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	dokumen	1	1	100%
6	Terlaksananya pembinaan kelompok P2I dan UMKM. Terlaksananya bantuan bibit tanaman, sayuran, toga dan pupuk kandang. Terlaksananya lomba B2SA dan lomba kelompok P2L	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	laporan	1	1	100%
7	Terselenggaranya legalisasi PSAT	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina	dokumen	1	1	100%
8	Terlaksananya penyediaan	Jumlah sarana dan	dokumen		1	100%

	sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota		1		
--	--	---	--	---	--	--

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

1. Mengadakan bimtek kader pangan yang bertujuan untuk membekali kader pangan dalam melaksanakan tugas yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga.
2. Melakukan diversifikasi pola konsumsi pangan kepada kaum milenial dan genz.
3. Perhitungan data score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.
4. Pencanangan Gerakan Makan Buah
5. Pembinaan Kelompok Masyarakat Karang Taruna
6. Menunjuk petugas Enumerator dalam melaksanakan tugas dan pendataan harga pangan lapangan, sehingga Data harga yang disampaikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tetap dilakukan pemantauan tentang Pasokan dan stok pangan yang ada di pasar jangan sampai terjadi penumpukan sehingga menyebabkan kelangkaan bahan makanan yang beredar dipasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
8. Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam jumlah yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan stok yang masih ada di gudang Bulog.
9. Penerbitan Nomor Registrasi PSAT-PDUK dan Pembinaan terhadap 5 komoditas PSAT.
10. Pemberian 5 rekomendasi sertifikasi prima 3 untuk sayur dan buah segar

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi :

1. Tidak mudah untuk mengajak masyarakat agar berperilaku pola konsumsi B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman), sehingga bisa menjadi role model di sekitarnya.

2. Pada pertengahan Tahun 2022, terjadi pemisahan di kementerian antara Kementerian Pertanian dan Badan pangan Nasional, sehingga untuk kegiatan P2L tidak lagi pada bidang ketahanan pangan.
3. Sulit untuk mendapatkan informasi asal pasokan bahan makanan yang beredar dipasar, karena biasanya pedagang berasal dari luar daerah khususnya pedagang sayuran, lombok, tomat dan bawang.
4. Belum adanya laboratorium hasil pertanian yang bersertifikasi di Kalimantan Selatan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penambahan Anggota Kader Pangan baru, sehingga tidak selalu orang yang sama pada setiap tahunnya.
2. Selalu diadakan Lomba B2SA agar penganekaragaman konsumsi pangan selalu teredukasi di masyarakat.
3. Menambah petugas Enumerator (kerjasama dengan Dinas Perdagangan) untuk memberdayakan tenaga Enumerator di UPT Pasar Bauntung Banjarbaru dan Pasar Ulin Raya di Landasan Ulin.
4. Harus ada pos-pos jaga di setiap perbatasan Kota Banjarbaru dan daerah lain yang merupakan lalulintas utama pangangkutan bahan pangan.
5. Kerja sama dengan BULOG tetap dilaksanakan sebagai pihak BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai penyedia beras (cadangan pangan) pemerintah daerah.
6. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tentang manfaat sertifikasi/registrasi PSAT kepada pelaku usaha pertanian.
7. Untuk registrasi yang masih dalam tahap pembinaan akan dilakukan pendampingan dan perbaikan supaya bisa naik level menjadi registrasi PSAT-PDUK level hijau.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran strategis ini dipilih karena Sektor Perikanan juga merupakan salah satu sektor unggulan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dalam upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani bagi masyarakat Kota Banjarbaru, sedangkan Indikator Kinerja nya adalah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Realisasi dan capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	405,54	450,85	111,17%

Berdasarkan Tabel 11 diatas, indicator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 405,54 ton dan terealisasi sebesar 450,85 ton dengan capaian kinerja sebesar 111,17%.

Metode pengambilan sampel untuk produksi perikanan budidaya dilakukan dengan cara pengambilan data langsung di lapangan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan terhadap para pembudidaya yang ada di Kota Banjarbaru. Kemudian data tersebut di masukkan (input) ke aplikasi Avdesk Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hasil dari aplikasi tersebut dijadikan sebagai data realisasi capaian tahun bersangkutan.

Penentuan target perikanan budidaya untuk Tahun 2021-2026 dengan melihat potensi wilayah Kota Banjarbaru , dimana Kota Banjarbaru mempunyai

potensi wilayah perairan yang tidak terlalu luas, akan tetapi masih bisa dikembangkan usaha budidaya perikanan nya dengan cara meningkatkan teknologi budidaya nya, diantaranya Kolam Terpal Bundar, Bioflok, Kolam Air Tenang, Karamba dan Jaring Apung.

Untuk data realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Ikan

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
1.	Nila	120.244
2.	Lele	197.861
3.	Patin	48.632
4.	Haruan	6.962
5.	Papuyu	54.804
6.	Gurami	22.351
	Total	450.854 Kg = 450,85Ton

Sumber Data : Avdesk Satu data KKP

Dari tabel 12 diatas terlihat jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 di Kota Banjarbaru sebesar 450.854 Kg (450,85 ton) yang terdiri dari beberapa jenis ikan introduksi diantaranya Ikan Nila, Lele, Patin, Gurami dan ikan lokal yaitu Haruan dan Papuyu. Dimana produksi terbesar adalah ikan lele sebesar 197.861 Kg (197, 86 ton) , kemudian Ikan Nila 120.244 Kg (120,24 ton), Ikan papuyu sebesar 54.804 Kg (54,80 ton) dan seterusnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021

Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	385	101.18 %	449,95	112.61 %	450,85	111,17 %

Berdasarkan tabel 13 di atas, terlihat bahwa realisasi Tahun 2021 sebesar 385 ton dengan capaian 101.18%, tahun 2021 dan Tahun 2022 realisasi sebesar 449,95 ton dengan capaian 112,61 % dan tahun 2023 realisasi sebesar 450,85 ton dengan capaian 111,17 % .

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kota Banjarmasin	Realisasi Kab.Tala	Realisasi Prov Kalsel
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	450.85	111,17 %	43.392.868	2.662,69	1.465,29	134.493.100

Berdasarkan Tabel 14 diatas, realisasi indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar 450,85 ton dengan capaian 111,17%, realisasi Kota Banjarmasin sebesar 2.662,69 ton, realisasi Kabupaten Tanah Laut sebesar 1.465,29 ton, realisasi Kabupaten Banjar sebesar 43.392.868 ton dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 134.493.100 ton . Dari data tersebut di atas terlihat realisasi Kota Banjarbaru dibandingkan dengan wilayah sekitar, maka realisasi produksi perikanan Budidaya Kota Banjarbaru jauh lebih rendah, hal ini disebabkan Banjarbaru merupakan wilayah perkotaan dan

memiliki potensi wilayah perikanan yang juga lebih rendah dari Kabupaten/Kota yang bersanding wilayah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Renstra Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	450,85	111,17 %	405,54	30.370.000

Berdasarkan Tabel 15 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 adalah sebesar 450,85 ton dengan capaian kinerja 111,17 %, namun jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 405,54 ton maka capaiannya sebesar 111,17 %, dan target Renstra telah tercapai, mengingat usaha budidaya ikan semakin diminati oleh masyarakat dan teknologi budidaya semakin berkembang dan mulai dikuasai dan diterapkan oleh pembudidaya ikan seperti budidaya kolam bioflok dengan cara peningkatan padat tebar dan penggunaan bibit unggul yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ikan. Sedangkan untuk target Nasional adalah sebesar 30.370.000 ton, mengingat potensi perikanan Budidaya yang begitu besar di seluruh Indonesia, jika dibandingkan dengan realisasi Kota Banjarbaru sebesar 450,85 ton maka capaiannya hanya sebesar 0,000015 % (sangat kecil sekali), hal ini disebabkan Banjarbaru merupakan wilayah perkotaan yang luas wilayah nya relatif lebih kecil dari daerah lain. Selain itu, jenis tanah untuk wilayah Kota Banjarbaru di dominasi oleh tanah gambut yang memiliki sifat asam yang tinggi sehingga kurang optimal untuk kegiatan budidaya perikanan.

Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya dan program penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi sumberdaya adalah sebesar 18,85%, ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran. Pada Tabel 11 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 111,17 % dan pada Tabel 16 terlihat realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan pagu sebesar Rp. 1.674.888.600 dan terealisasi sebesar Rp. 1.546.344.640 atau dengan capaian 92,32 %. Dari kedua Tabel tersebut terlihat realisasi capaian kinerja lebih tinggi 18,85 % dari pada realisasi capaian anggaran.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Pada program tersebut dilaksanakan pembinaan, pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana perikanan serta pemberian bibit dalam rangka pengembangan budidaya perikanan di Kota Banjarbaru yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran Kinerja Indikator.

Selain program tersebut diatas terdapat pula Kegiatan pendukung lainnya yaitu dukungan dari pemerintah pusat melalui Balai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT) Mandingan Kalimantan Selatan berupa bantuan benih ikan Nila, Patin, Lele, Ikan Hias Komet, calon induk Ikan Nila, bantuan sarana prasarana budidaya ikan Nila Sistem Bioflok dan dimana bantuan-bantuan tersebut juga turut mendukung dalam upaya mencapai sasaran Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Dalam pencapaian target kinerja, ada beberapa upaya yang dilakukan agar target kinerja tersebut dapat tercapai, antara lain :

1. Merangkul jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang tersebar diseluruh Kecamatan Kota Banjarbaru.
2. Melaksanakan program pemerintah seperti Program Urban Farming dan mendukung Program RT Mandiri Bidang perikanan.
3. Meningkatkan peran dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan budidaya perikanan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru baik berupa barang, pendanaan maupun penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para pembudidaya ikan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh perikanan bersama dengan petugas Bidang Perikanan DKP3;
4. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder.

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan produksi perikanan budidaya di Kota Banjarbaru, yaitu :

A. Faktor Peluang

1. Tingginya permintaan ikan;
2. Dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Balai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT) Mandingan Kalimantan Selatan berupa bantuan benih ikan Nila, Patin, Lele, Ikan Hias Komet, calon induk Ikan Nila, bantuan sarana prasarana budidaya ikan Nila Sistem Bioflok serta adanya dukungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun dukungan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru baik berupa barang, pendanaan maupun penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para pembudidaya ikan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh perikanan bersama dengan petugas Bidang Perikanan DKP3;
3. Banyaknya tempat usaha dengan produk olahan ikan;

4. Adanya hubungan baik dengan stakeholder.

B. Faktor Kekuatan

1. Akses sarana produksi yang mudah;
2. Potensi sumberdaya alam yang mendukung;
3. Lokasi usaha pembesaran yang strategis; dan
4. Hubungan baik dengan konsumen.

HAMBATAN

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah kualitas benih yang ditebar serta kondisi cuaca yang ekstrim yang turut berpengaruh terhadap budidaya perikanan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah dengan pemilihan kualitas benih yang unggul serta adanya pelatihan serta bimbingan teknis budidaya sehingga petani ikan mempunyai ilmu budidaya yang mampu meningkatkan produksi perikanan budidayanya.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.674.888.600 telah terealisasi sebesar Rp.1.546.344.640 atau dengan capaian sebesar 92,32% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Tabel Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.674.888.600	1.546.344.640	128.543.960	92,32
	Jumlah	1.674.888.600	1.546.344.640	128.543.960	92,32

Pada Tabel 16 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp. 1.674.888.600 dan realisasi Rp. 1.546.344.640 dengan capaian 92,32 %.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya di dukung dengan Kinerja Esselon III dan Esselon IV, dengan rincian sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA BIDANG PERIKANAN (Esselon III)

Pada Bidang Perikanan (Esselon III) ada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang ingin di capai, yaitu :

1	Peningkatan Usaha pembudidaya ikan skala kecil	Persentase Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah	%	10	43,23	432%
2	Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air	Persentase sumberdaya perikanan yang dapat diusahakan	Kawasan	1	1	100%
3.	Peningkatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah produksi usaha poklaksar yang dinyatakan berkualitas dan aman	ton	118,6	173,8	147 %

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN :

- ❖ Meningkatkan pembinaan dan monitoring evaluasi kepada kelompok budidaya ikan (Pokdakan).
- ❖ Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana perikanan.
- ❖ Pelepas liaran benih ikan lokal (Restocking) di perairan umum yaitu Waduk Bandara Syamsudin Noor Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Selatan sebanyak 40.000 ekor benih ikan Baung, paket bantuan dari BPBAT Mandiangin. Meningkatkan pengawasan dan monitoring evaluasi kepada masyarakat tentang penangkapan ikan di perairan umum.
- ❖ Meningkatkan pembinaan dan monev kepada Poklahsar (Kelompok Pengolah dan pemasar Hasil Perikanan) untuk melaksanakan Cara Pengolahan Ikan yang Baik.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi :

- ❖ Terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.
- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan perairan umum.
- ❖ Masih adanya masyarakat yang melakukan ilegal fishing
- ❖ Masih rendahnya kesadaran UKM untuk melaksanakan Cara Pengolahan Ikan yang Baik yang dapat menghasilkan Produk Olahan Ikan yang aman, higienes dan sesuai standart kesehatan.

RENCANA TINDAK LANJUT

- ❖ Meningkatkan pembinaan dan monitoring evaluasi kepada kelompok budidaya ikan (Pokdakan).
- ❖ Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana perikanan.
- ❖ Meningkatkan pengawasan dan monitoring evaluasi kepada masyarakat tentang penangkapan ikan di perairan umum.

- ❖ Melaksanakan Sosialisasi UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang didalamnya terdapat peraturan tentang illegal fishing.
- ❖ Meningkatkan pembinaan dan money kepada poklaksar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) untuk melaksanakan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik.
- ❖ Meningkatkan jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil perikanan.

Capaian Kinerja Esselon IV

Realisasi Capaian Kinerja Esselon IV dalam rangka mendukung Bidang Perikanan adalah :

1	Terlaksananya Bimtek, Pembinaan dan Money	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	5	29	580%
2	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa.	dokumen	1	1	100%
3	Terselenggaranya bimtek bagi poklaksar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	unit	2	2	100%
4	Terlaksananya pembinaan calon poklaksar	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	ton	132,2	173,8	131,46%
5	Terlaksananya pemberian fasilitas usaha pengolahan ikan bagi poklaksar	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	3	24	800%

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran sub kegiatan :

1. Melaksanakan pelatihan budidaya perikanan.
2. Melaksanakan monev dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan).
3. Melaksanakan sosialisasi UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang didalamnya terdapat peraturan tentang pengawasan usaha perikanan.
4. Pemasangan papan seruan diperairan umum dan papan peringatan illegal fishing dan menangkap/menjual anak-anak ikan.
5. Melaksanakan pelatihan/bimtek pengolahan hasil perikanan/usaha perikanan bagi poklhasar dan UMKM.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi :

1. Terbatasnya jumlah peserta pelatihan dan kuantitas pelaksanaan pelatihan bagi pembudidaya.
2. Belum optimalnya penanganan tentang ilegal fishing.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan.
4. Terbatasnya jumlah peserta pelatihan dan kuantitas pelaksanaan pelatihan bagi poklhasar.

RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Meningkatkan kuantitas pembinaan dan monev kepada Pokdakan
- b. Meningkatkan kuantitas pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan.
- c. Meningkatkan pembinaan, monev dan pengawasan kepada masyarakat pengguna/penangkap ikan diperairan umum serta pokmaswas.
- d. Meningkatkan pelatihan pengawasan usaha perikanan.
- e. Meningkatkan jumlah peserta pelatihan dan kuantitas pelaksanaan pelatihan bagi poklhasar/UMKM.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan

Mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern memerlukan dukungan penyediaan prasarana dan sarana pertanian (Prasatani) untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatannya. Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berinisiatif menggenjot produktivitas pertanian dengan meluncurkan Revolusi Industri di bidang pertanian. Sarana pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, karena kebutuhan pangan khususnya padi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah termasuk Kota Banjarbaru, sehingga pengembangan sarana pertanian ini akan selalu ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

Untuk mengukur sasaran ini Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) khususnya tanaman padi. Sedangkan rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Produksi} = \text{Luas panen} \times \text{Produktivitas}$$

Untuk realisasi dan capaian Tahun 2023 di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 17. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian/Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	7.082,69	4.525,81	63,90 %

Berdasarkan Tabel 17 diatas, indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan khususnya padi pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 7.082,69 ton dan terealisasi sebesar 4.525,81 ton atau dengan capaian kinerja sebesar 63,90%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan dengan indikator kinerja Jumlah produksi Tanaman Pangan tahun 2023 terhadap target tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Faktor Alam/cuaca

Faktor alam/cuaca, terjadinya fenomena El Nino yang memicu terjadinya kekeringan berkepanjangan sehingga proses tanam padi jadi terlambat dan tanaman padi yang di tanam tumbuh kerdil.

2. Serangan hama dan penyakit tanaman.

Terjadinya serangan hama dan penyakit tanaman, tanaman padi di beberapa wilayah terkena serangan penyakit virus tungro yang biasanya menyerang pada fase pertumbuhan vegetatif dan menyebabkan tanaman tumbuh kerdil dan berkurangnya jumlah anakan yang mengakibatkan sebagian besar padi tidak dapat dipanen. Tungro adalah jenis penyakit tanaman yang menyerang secara merata dan sampai sekarang belum ada obatnya sehingga masih sulit untuk diatasi. Selain itu juga terdapat serangan hama burung Manyar yang cukup merugikan petani. Hama burung ini biasanya menyerang saat padi siap panen, dimana Manyar datang bergerombol untuk memakan bulir padi yang telah berisi, karena jumlahnya ratusan hingga ribuan, petani sering kewalahan mengusirnya. Serangan burung ini menjadi masalah besar karena masih banyak petani yang tidak panen serempak. Adanya serangan hama tikus juga mengurangi jumlah produksi padi.

3. Lahan Sawah tadah Hujan

Lahan sawah di Kota Banjarbaru adalah jenis lahan tadah hujan, dimana kesuburan tanah secara umum rendah dan pH tanah rendah yang mengakibatkan kahat (kekurangan) hara. Selain itu, lahan sawah tadah hujan umumnya memiliki keterbatasan dalam ketersediaan air karena hanya

mengandalkan air hujan sebagai sumber air, tanpa adanya bangunan-bangunan irigasi permanen. Lahan sawah tadah hujan rentan terhadap kekeringan terutama pada saat kemarau panjang karena pasokan air yang sulit diprediksi seperti yang terjadi tahun ini. Karena kondisi tersebut, pemanfaatan lahan tadah hujan umumnya ditanami hanya satu sampai dua kali dalam setahun. Hal ini yang menyebabkan produktivitas lahan sawah tadah hujan rendah.

4. Penanaman Benih padi tidak serempak

Penyakit tungro akan selalu ada pada daerah dengan pola tanam tidak serempak dan penanaman sepanjang tahun. Pola tanam serempak akan memutus siklus hidup vektor dan dapat memperpendek waktu keberadaan sumber inoculum. Untuk mengurangi serangan penyakit tungro, dianjurkan tanam serempak minimal pada luasan 40 ha. Penanaman jenis bibit unggul juga dapat memutus virus tungro bergantian dengan penanaman bibit padi lokal.

Untuk lebih jelasnya data realisasi produksi tanaman pangan khususnya padi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Luas Panen perhektar dan produksi Padi PerKecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan District	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	produktivitas (Ton/Ha)
1.	Landasan Ulin	48,00	168,00	3,96
2.	Liang Anggang	47,50	232,75	3,60
3.	Cempaka	1.010,00	3.636,00	3,50
4.	Banjarbaru Utara	123,50	489,06	4,90
5.	Banjarbaru Selatan	-	-	-
Kota Banjarbaru		1.229	4.525,81	3,68

Sumber Data Bidang Pertanian dan Perkebunan

Dari Tabel 18 diatas dapat dilihat pada tahun 2023 produksi padi adalah sebesar 4.525,98 ton, dimana produksi tersebut tersebar di 4 (empat) kecamatan dengan produksi terbesar berada di kecamatan Cempaka yaitu sebesar 3.636 ton, Kecamatan Liang Anggang sebesar 232,75 ton, Kecamatan Banjarbaru Utara sebesar 489,06 ton dan Kecamatan Landasan Ulin sebesar 168,00 ton, sedangkan untuk Kecamatan Banjarbaru Selatan tidak ada memiliki lahan sawah sehingga tidak ada produksi nya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021

Tabel 19. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		2022		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian / Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	4.525,81	63,90 %	4.525,98	65,18 %	6.852,48	100,66%

Berdasarkan tabel 19 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2023 adalah sebesar 4.525,81 ton, tahun 2022 sebesar 4.525,81 ton sedangkan tahun 2021 sebesar 6.852,48 ton.

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian/ Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	4.525,81	63,90%	109.318,53	56.167,66	4.188,87	835.282,46

Berdasarkan Tabel 20 diatas, realisasi indicator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar 4.525,81 ton, jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Banjar (109.318,53 ton), realisasi Kabupaten Tanah Laut (sebesar 56.167,66 ton), realisasi Kota Banjarmasin (sebesar 4.188,87 ton) dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan (sebesar 835.282,46 ton) Jumlah produksi Tanaman Pangan khususnya padi Kota Banjarbaru jauh lebih rendah, hal ini disebabkan Banjarbaru merupakan daerah perkotaan dan memiliki luas lahan pertanian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Renstra Tahun 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian/ Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	4.525,81	63,90 %	7.082,69	N

Berdasarkan Tabel 21 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023 adalah sebesar 4.525,81 ton, dengan capaian kinerja sebesar 63,90%. Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 7.082,69 ton, maka hanya tercapai sekitar 63,90 %. Target Renstra tidak tercapai karena adanya faktor alam (terjadinya El Nino) dan cuaca ekstrim, dan serangan hama dan penyakit tanaman, sehingga berpengaruh terhadap capaian produksi tanaman pangan (padi). Sedangkan untuk target Nasional adalah N (tidak ada) karena adanya perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Masih terdapat peluang pencapaian target Renstra akan tercapai, mengingat Peraturan Daerah tentang LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang LP2B ini diharapkan alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dan sarana prasarana produksi pertanian dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya produksi pertanian juga akan meningkat dan dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan.

UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi, ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, maksudnya yang semula tanam satu kali dalam satu tahun menjadi tanam dua kali dalam satu tahun;
2. Dukungan sarana dan prasarana pertanian, diantaranya dengan adanya peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi serta ketersediaan benih unggul.
3. Penerapan sistem pertanaman jarak legowo yang merupakan inovasi pola bertanam dengan berselang seling antara dua atau lebih baris tanaman padi dan di selingi satu baris kosong ;
4. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat (bantuan berupa alat mesin pertanian) maupun pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

berupa pendanaan dan memberikan penyuluhan dan bimbingan-bimbingan teknis tentang pertanian kepada para petani yang ada di Kota Banjarbaru.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adanya serangan hama Tungro, serangan hama tikus, berkurangnya luas tanam serta adanya perubahan iklim yang ekstrim.

RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan dalam rangka perbaikan, diantaranya :

1. Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) secara tepat guna ;
2. Penggunaan sarana pertanian secara optimal dan perbaikan saluran air /irigasi.
3. Memaksimalkan pemanfaatan alat mesin pertanian.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Pangan pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.288.154.400 dengan realisasi sebesar Rp.5.980.741.206 atau dengan capaian 52,98 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.091.143.000	1.469.044.000	4.622.099.000	24,12 %
2.	Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	5.197.011.400	4.511.697.206	685.314.194	86,81 %
	Jumlah	11.288.154.400	5.980.741.206	5.307.413.194	52,98 %

Pada Tabel 22 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Penyediaan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 11.288.154.400 dan realisasi sebesar Rp 5.980.741.206 atau dengan capaian 52,98 %.

Analisis Efisiensi Sumberdaya dan Program Penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Pada Tabel 22 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian dan Program penyediaan Prasarana Pertanian adalah sebesar Rp.11.288.154.400 dan realisasi sebesar Rp 5.980.741.206 atau dengan capaian 52,98% , dan pada Tabel 17 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 63,90 %.

Pada program ini terlihat realisasi pagu yang masih rendah (belum maksimal), sekitar 52,98 %, karena pada program ini terdapat dana Insentif Fiskal yang belum bisa direalisasikan semua (menjadi silva) di Tahun 2023, dimana pagu silva tersebut akan di pindah ke Tahun Anggaran 2024 sambil menunggu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut di atas, sehingga analisis efisiensi untuk program ini sementara belum bisa dihitung.

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan sarana Pertanian/Peternakan khususnya dalam pencapaian target Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi) adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dimana pada Program tersebut dilaksanakan Pelatihan, sosialisasi dan pengadan sarana dan prasarana pertanian, bibit dan benih yang berkenaan dengan tanaman pangan, hortikultura dalam upaya pencapaian sasaran kinerja.

3.2.3. Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pada Bidang Pertanian dan Perkebunan (Esselon III) ada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang ingin di capai, yaitu :

1.	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Luas lahan yang di garap	ha	30	30	100%
2.	Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik tanaman	Persentase Cakupan pemanfaatan SDG tanaman	%	51	51	100%
3.	Peningkatan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan	%	5	5	100%
		Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan	%	10	10	100%
		Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan	%	0.0009	0.0009	100%

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

- ❖ Meningkatkan produksi tanaman dengan indeks pertanaman (IP) dari IP 150 ke IP 200 yang memang sudah di lakukan sejak dua tahun yang lalu tetapi dalam skala kecil. IP 200 dapat ditingkatkan pada tahun 2024 dengan diperluas lahan panen dengan bantuan benih unggul dan pengairan yang mencukupi.
- ❖ Lahan pertanian yang terendam banjir setiap tahun mengupayakan penanaman padi apung untuk pemanfaatan lahan dan meningkatkan produksi padi..
- ❖ Dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk peningkatkan produksi pertanian dengan pemanfaatan alat mesin pertanian yang ada di kelompok tani maupun yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

HAMBATAN

- ❖ Perubahan musim yang ekstrim (fenomena El Nino dan Elmina)
- ❖ Serangan hama penyakit tanaman pada tanaman padi, terutama virus tungro, hama burung dan tikus.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pembuatan irigasi baik itu irigasi sekunder dan tersier serta normalisasi saluran air.
2. Pengendalian OPT (Organisme pengganggu tanaman) secara tepat guna dan ramah lingkungan dengan pestisida organik.
3. Penerapan sistem pertanaman Jejer Legowo dan Tanam Padi Tugal. Jejer legowo suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 perhektar dan juga memperlancar sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman dapat berfotosintesis. Tanam padi tugal dengan cara di tugal jika curah hujan masih sedikit.
4. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Banjarbaru (bantuan berupa subsidi pupuk, Alat mesin pertanian dan bibit unggul).

Capaian Kinerja Esselon IV

Realisasi Capaian Kinerja Esselon IV dalam rangka mendukung Bidang Pertanian dan Perkebunan adalah :

1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Laporan	1	1	100%
		Jumlah pelatihan/bimtek/sekolah lapang yang dilaksanakan	Kali	6	6	100%
2	Terlaksananya koordinasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	laporan	1	1	100%

3	Terlaksananya peningkatan kualitas SDG tanaman	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB	1	1	100%
4	Terlaksananya pendampingan/pelatihan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	laporan	1	1	100%

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

- ❖ Mengadakan BinteK/pelatihan dari IP 150 ke IP 200 ke kelompok tani di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian se Kota Banjarbaru
- ❖ Mengadakan sosialisasi IP 200 untuk perluasan lahan panen dengan penggunaan benih unggul dan dengan pengairan yang mencukupi
- ❖ Mengadakan sosialisasi padi apung yang lahannya setiap tahun terendam banjir
- ❖ Pengadaan sarana dan prasarana alat mesin pertanian untuk peningkatan produksi pertanian
- ❖ Pengadaan jaring burung, plastik pagar tikus dan bahan pengendali organisme pengganggu tanaman untuk mengatasi serangan hama.

HAMBATAN

- ❖ Perubahan musim yang ekstrim (fenomena El Niño dan Elmina)
- ❖ Serangan hama penyakit tanaman pada tanaman padi, terutama virus tungro, hama burung dan tikus.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pembuatan irigasi baik itu irigasi sekunder dan tersier serta normalisasi saluran air.
2. Pengendalian OPT (Organisme pengganggu tanaman) secara tepat guna dan ramah lingkungan dengan pestisida organik.

3. Penerapan sistem pertanaman Jejer Legowo dan Tanam Padi Tugal. Jejer legowo suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 perhektar dan juga memperlancar sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman dapat berfotosintesis. Tanam padi tugal dengan cara di tugal jika curah hujan masih sedikit.
4. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Banjarbaru (bantuan berupa subsidi pupuk, Alat mesin pertanian dan bibit unggul).

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Populasi Ternak

Sektor Peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kalimantan Selatan termasuk juga Kota Banjarbaru yang terus didorong untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi daerah penyedia ternak. Peternakan di Banjarbaru hampir sama dengan daerah lain meliputi peternakan hewan besar, kecil dan unggas. Untuk meningkatkan sektor peternakan upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi ternak, pengolahan hasil dan pembinaan usaha peternakan, karena ternak dalam pemenuhan kebutuhan akan protein hewani.

Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan produksi ternak di Kota Banjarbaru, diantaranya dengan menambah sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan yaitu dengan dibangunnya Klinik Hewan, Demplot Kambing dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan (UPT BTPKH) untuk membantu masalah pembibitan ternak dan kesehatan hewan ternaknya, pengadaan Mobil Klinik Hewan untuk pelayanan langsung ke lokasi pengguna layanan Kesehatan hewan. Selain itu diadakan pula pelatihan dan penyuluhan tentang peternakan, baik masalah produksi, penyakit hewan, sehingga masyarakat ternak lebih memahami usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk mengukur sasaran ini Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Populasi Ternak (ekor). Untuk realisasi dan capaian Indikator Kinerja Jumlah Populasi Ternak Tahun 2023 di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 23.Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.879.000	2.867.877	99,61 %

Realisasi jumlah populasi ternak pada tahun 2023 sebesar 2.867.877 ekor dengan capaian 99,61% dimana capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak Tercapainya target ini antara lain disebabkan adanya alih guna lahan peternakan. Akan tetapi pengurangan tersebut dapat di minimalisir dengan penyebaran ternak bantuan selain dana yang bersumber dari dana APBD dan ada juga yang bersumber dari dana APBN, yang digunakan untuk pengembangan ternak Kota Banjarbaru melalui Kelompok-Kelompok Tani yang bergerak di bidang peternakan, dimana kelompok kelompok tani tersebut mendapat bantuan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru. Dengan adanya bantuan ternak kecil dan ternak unggas ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani ternak dan sekaligus juga meningkatkan populasi ternak itu sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi target.

Untuk sebaran dan data jumlah populasi ternak Kota Banjarbaru di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Jumlah Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Serta Unggas Menurut Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2023

No	Kecamatan Sub District	Populasi (Ekor)							
		Sapi Cow	Kambing Goat	Ayam Buras Domestic Hen	Ayam Potong Broiler	Ayam Petelur Laying Pullet	Itik Duck	Burung Puyuh	Babi Pig
1	Landasan ulin	557	785	12.793	1.575.000		11.345	39.590	982
2	Liang Anggang	695	527	10..934	81.300	36.312	11.775	10.745	-
3	Cempaka	679	193	13738	779.621	85.621	2.517	-	-
4	Banjarbaru Utara	515	375	10.735	101.127		3.206	-	-
5	Banjarbaru Selatan	237	387	13.488	47.200		14.878	-	-
Jumlah Total		2.683	2.267	61.668	2.584.248	121.933	43.721	50.335	982
		2.867.877 ekor							

Sumber data dari verifikasi dan validasi data peternakan Prov. Kal Sel Th. 2023

Pada tabel 24 di atas terlihat jumlah populasi ternak untuk Tahun 2023 Kota Banjarbaru adalah sebesar 2.867.877 ekor, yang terdiri dari ternak sapi, kambing, babi dan ternak unggas (ayam, itik dan burung puyuh)), dengan populasi yang terbesar adalah ternak unggas. Dimana ternak tersebut tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021

Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.832.443 ekor	100,32 %	2.854.153 ekor	100,11 %	2.867.877 ekor	99,61 %

Berdasarkan tabel 25 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2021 adalah sebesar 2.832.443 ekor (100,32%), dan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar

2.854.153 ekor (100,11 %), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 2.867.877 ekor (99,61 %) terjadi peurunan, hal ini disebabkan adanya berkurangnya lahan peternakan sehingga mempengaruhi terhadap populasi ternak. Akan tetapi untuk mengurangi pengurangan populasi tersebut dilakukan penyebaran ternak yang cukup banyak dalam rangka program juara Urban farming untuk pengembangan ternak Kota Banjarbaru melalui Kelompok-Kelompok Tani yang bergerak di bidang peternakan, dimana kelompok kelompok tani tersebut mendapat bantuan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru. Dengan adanya bantuan ternak ini sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani ternak dan sekaligus juga meningkatkan populasi ternak itu sendiri yang pada akhirnya dapat mengkatrol realisasi.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.867.877 ekor	99,61 %	21.911.919	39.342.557 ekor	11.006 ekor	88.804.362

Berdasarkan Tabel 26 diatas, realisasi indikator kinerja Jumlah Populasi Ternak Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar 2.867.877 ekor , dengan capaian kinerja 99,61 %, sedangkan untuk data sanding Kabupaten Banjar 21.911.919 ekor, Kabupaten Tanah Laut 39.342.557 ekor, Kota Banjarmasin 11.006 ekor dan Provinsi Kalimantan Selatan 88.804.362 ekor.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Renstra Tahun 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.867.877 ekor	99,61 %	2.879.000 ekor	N

Berdasarkan Tabel 27 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator “Jumlah Populasi Ternak” Tahun 2023 adalah sebesar 2.867.877 ekor dengan capaian kinerja sebesar 99,61 %, jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 2.879.000 maka capaiannya hanya sebesar 99,61 %. Sedangkan untuk target Nasional adalah N (tidak ada) karena adanya perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Masih terdapat peluang pencapaian target Renstra dimasa yang akan datang, mengingat usaha peternakan sekarang sudah mulai diminati oleh sebagian besar masyarakat peternak di Kota Banjarbaru, karena usaha di bidang peternakan memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta adanya perhatian dari Kementerian Pertanian RI khususnya bidang Peternakan untuk memberikan bantuan ternak kepada masyarakat miskin agar perekonomiannya meningkat, sehingga berdampak pula pada peningkatan populasi ternak.

Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya dan program penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Pada Tabel 22 diatas terlihat jumlah pagu untuk

Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian adalah sebesar Rp. . 5.035.138.000 dan realisasi sebesar Rp 3.818.380.127 atau dengan capaian 75,83 %, sedangkan Pada Tabel 23 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 99,61 %.

Pada program ini terlihat realisasi pagu yang masih rendah (belum maksimal), sekitar 75,83 %, karena pada program ini terdapat dana Insentif Fiskal yang belum bisa direalisasikan semua (menjadi silva) di Tahun 2023, dimana pagu tersebut akan di pindah ke Tahun Anggaran 2024 sambil menunggu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut di atas, sehingga analisis efisiensi untuk program ini sementara belum bisa dihitung.

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Populasi Ternak adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dimana pada program tersebut terdapat beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan capaian sasaran kinerja.

Selain Program tersebut diatas, terdapat pula program lainnya dalam upaya peningkatan capaian sasaran kinerja Jumlah Populasi Ternak yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan itu sendiri yaitu pada Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner, dimana program tersebut adalah untuk membantu menangani/pencegahan terhadap penyakit hewan/ternak milik masyarakat.

Selain itu, terdapat pula Program pendukung lainnya yang berasal dari Provinsi dan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kinerja diantaranya :

- ❖ Program Provinsi Kalimantan Selatan berupa Program Swasembada Sapi Potong, dengan bantuan : Straw dan N2 Cair.
- ❖ Program Kementerian Pertanian Vaksinasi PMK, dengan bantuan berupa : vaksin, obat-obatan dan peralatan.

- ❖ Program Kementerian Pertanian “SIKOMANDAN” (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) untuk meningkatkan populasi ternak dengan paket bantuan berupa : operasi kegiatan inseminasi dan pelaporan.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKSANAKAN

Ada beberapa upaya yang dilakukan agar populasi ternak di Kota Banjarbaru terus meningkat, diantaranya :

1. Memberikan pemahaman yang lebih intensif kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara beternak yang baik, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk beternak disemua macam jenis ternak, seperti ternak unggas, kambing dan sapi yang akhirnya dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berupa pendanaan/anggaran untuk pengembangan peternakan yang akhirnya menambah populasi ternak itu sendiri di Kota Banjarbaru.

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan populasi ternak di Kota Banjarbaru, diantaranya :

1. Adanya peningkatan minat masyarakat untuk beternak disemua macam jenis ternak, seperti ternak unggas, kambing dan sapi karena dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat pasca wabah pandemi covid..
2. Peternakan menjadi salah satu bidang yang menjanjikan untuk penambahan pendapatan petani dimasa wabah pandemi ini, seperti unggas menghasilkan telur dan daging, kambing dan sapi menghasilkan daging sebagai protein hewani untuk masyarakat;
3. Pemasaran hasil peternakan sangat mudah dilingkungan sekitar sehingga kesejahteraan petani masih terjaga;

4. Dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa penyebaran ternak sapi dalam mendukung Program Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu Swasembada Sapi Potong dan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berupa pendanaan/anggaran dan penyuluhan maupun bimbingan teknis terkait dengan bidang dan ilmu peternakan kepada masyarakat peternak sehingga meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengembangan peternakan yang akhirnya menambah populasi ternak itu sendiri di Kota Banjarbaru.

HAMBATAN

Hambatan terbesar yang dihadapi Tahun 2023 dalam peningkatan populasi ternak adalah alih fungsi lahan peternakan, hal ini menyebabkan perkembangan peternakan melambat karena keterbatasan lahan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatkan peternakan yang intensif
- b. Meningkatkan peternakan yang ramah lingkungan.
- c. Mengusahakan penataan spot-spot peternakan yang sesuai dengan tata ruang wilayah.

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dengan Indikator Kinerja Jumlah Populasi Ternak (ekor) adalah sebesar Rp. 5.035.138.000 realisasi sebesar Rp. 3.818.380.127 dengan capaian 75,83 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.035.138.000	3.818.380.127	1.216757.873	75,83
	Jumlah	5.035.138.000	3.818.380.127	1.216757.873	75,83

Pada Tabel 28 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan realisasi Sarana Pertanian sebesar Rp. 5.035.138.000 dan realisasi sebesar Rp 3.818.380.127 atau dengan capaian 75,83%.

Sasaran Strategis Meningkatnya Populasi Ternak, didukung dengan Kinerja Esselon III dan Esselon 4, dengan rincian sebagai berikut

3.2.4. Kepala Bidang Peternakan

Pada Bidang Peternakan (Esselon III) ada 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang ingin di capai, yaitu :

Peningkatan kualitas bibit ternak	Persentase jumlah kelahiran ternak yang berkualitas	%	35	41	117.0%
peningkatan pengembangan ternak	Persentase ternak bantuan yang berproduksi	%	60	75	125.0%
Peningkatan pelayanan penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak	Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani	ekor	100	300	300%
Peningkatan pembinaan tempat pemotongan (tempat pemotongan hewan dan tempat pemotongan unggas)	Persentase tempat pemotongan yang dibina	%	10	10	100%

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

- ❖ Menambah tenaga inseminator sehingga pelayanan IB (Inseminasi Buatan) dapat lebih ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kelahiran ternak yang berkualitas.
- ❖ Menerapkan pada semua ternak wajib vaksinasi PMK terutama untuk ternak yang berasal dari luar daerah, sehingga terjadi peningkatan kasus penyakit yang tertangani (walaupun Banjarbaru belum ada kasus PMK).
- ❖ Setiap tempat pemotongan ternak dibina dan disarankan untuk pengurusan NKV (Nomor Kontrol Veteriner).

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi :

- ❖ Kurang nya Sumber Daya Manusia Bidang Peternakan, saat ini hanya 12 orang, sedangkan banyak kegiatan yang harus di tangani baik sumber dana APBD maupun APBN, sehingga hal ini membuat beban kerja yang terlalu besar.

RENCANA TINDAK LANJUT

- ❖ Menambah tenaga inseminator sehingga pelayanan IB (Inseminasi Buatan) dapat lebih ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kelahiran ternak yang berkualitas.
- ❖ Menerapkan pada semua ternak agar melakukan peternakan ramah lingkungan sehingga mengurangi dampak sosial dengan masyarakat sekitar
- ❖ Setiap tempat pemotongan ternak dibina dan disarankan untuk pengurusan NKV (Nomor Kontrol Veteriner).
- ❖ Setiap ternak yang masuk ke Kota Banjarbaru wajib vaksinasi PMK, mengingat Kota Banjarbaru merupakan daerah dengan pengusaha ternak paling banyak dan lalu lintas ternak yang tinggi.
- ❖ Perlunya persiapan untuk pembangunan Rumah Potong Unggas yang memenuhi syarat, mengingat Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyiapkan sarana prasara pendukung peternakan.

Capaian Kinerja Esselon IV

Realisasi Capaian Kinerja Esselon IV dalam rangka mendukung Bidang Peternakan adalah :

1	Terlaksananya IB Ternak	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	ekor	100	155	155%
2	Terlaksananya distribusi bantuan ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	ekor	458	458	100.0%
3	Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	laporan	4	4	100%
4	Terlaksananya pengobatan pada hewan/ternak	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	4	100%
5	Terlaksananya pengambilan sampel produk asal hewan	Jumlah penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	laporan	4	4	100%

UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN

- ❖ Melaksanakan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak dalam rangka melayani permintaan IB dari masyarakat.
- ❖ Penyebaran bantuan ternak kepada Kelompok Tani yang ada di Kota Banjarbaru.
- ❖ Vaksinasi rabies dengan program vaksinasi rabies gratis pada saat hari jadi Kota Banjarbaru dan Hari Rabies Sedunia.
- ❖ Pengobatan ternak dan vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dalam rangka mencegah penyebaran PMK di Kota Banjarbaru, terutama untuk ternak yang berasal dari luar daerah.
- ❖ Pengambilan sampel pada daging segar yang dijual di pasar tradisional, dengan maksud pengawasan terhadap produk pangan segar asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- ❖ Pengadaan Mobil Klinik Keliling untuk memudahkan pelayanan.

HAMBATAN

- ❖ Kurangnya SDM peternakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan vaksinasi PMK.

RENCANA TINDAK LANJUT

- ❖ Pengelolaan Peternakan ramah lingkungan dan
- ❖ Persiapan Pembangunan Rumah Potong Unggas untuk memenuhi Kewajiban Daerah sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menurut Permentan No 95 Tahun 2012 yang isinya Daerah wajib menyediakan Rumah Potong Hewan/Unggas untuk ketersediaan daging yang ASUH.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani

Sasaran tersebut menjadi sangat penting dan dipilih karena sumberdaya penyuluh dan petani merupakan salah satu ujung tombak agar produktivitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator utama yaitu Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score, dengan rumus :

$$\text{Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score} = \frac{\text{Jumlah Kelompok yang Naik Kelas}}{\text{Jumlah Total kelompok Tani}} \times 100$$

Penilaian kelas Kelompok Tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih berprestasi dalam hal mencapai kelas kelompok yang lebih tinggi. Selain itu dapat diketahui kelemahan-kelemahan kelompok yang dimiliki sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan.

Indikator penilaian kelas/kemampuan kelompok tani terdiri dari beberapa aspek :

- 1). Aspek kemampuan merencanakan ; tersedianya rencana belajar dan rencana usaha kelompok tani.
- 2). Aspek kemampuan mengorganisasikan; Kelompok memiliki struktur organisasi, memiliki aturan dan norma yang berlaku untuk anggotanya, dan kelompok memiliki kelengkapan administrasi pembukuan : (Buku anggota, Buku notulen pertemuan, Buku Kegiatan, Buku Tamu, Buku Daftar hadir, Buku Kas, Buku iuran, Buku rencana Kegiatan dan lain lain).
- 3). Aspek kemampuan melaksanakan kegiatan ; Adanya pertemuan rutin kelompok tani, adanya kegiatan rutin belajar di kelompok tani, adanya kegiatan usaha tani, adanya pemupukan modal di kelompok tani dan lain-lain.
- 4). Aspek kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan ; adanya evaluasi usaha kelompok di kelompok tani. Evaluasi ini meliputi : Evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan usaha, Evaluasi dengan melibatkan unsur dari dalam dan luar kelompok tani serta lembaga/instansi terkait.
- 5). Aspek kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani ; Adanya pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus, adanya penyiapan calon pengganti pengurus, adanya periode tertentu untuk pemilihan dan penggantian pengurus dan lain lain.

Setelah dilakukan penilaian terhadap 5 (lima) aspek tersebut, maka selanjutnya dapat ditentukan kelas kemampuan untuk masing-masing kelompok tani sesuai dengan nilai yang diperoleh. Penentuan Kelas kemampuan kelompok tani dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu:

1. Kelas Pemula, skor antara 0 – 245
2. Kelas lanjut, skor antara 246 – 455
3. Kelas Madya, skor antara 456 – 700
4. Kelas Utama, skor antara 701 – 1.000

Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score di Kota Banjarbaru untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 29. Realisasi dan Capaian Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score	%	68 %	68,33%	100,48 %

Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas (score) di tahun 2023 ditargetkan sebesar 68 % (dengan rincian sebanyak 205 Kelompok Tani dari total keseluruhan Poktan sebanyak 300 Kelompok Tani) dan terealisasi 68,33% dengan capaian 100,48 %

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani , yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan , kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan kelompok tani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian Kota Banjarbaru dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani nya.

Peran pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam pengembangan kelembagaan petani masih sangat diperlukan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas /score, diantaranya dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, SL, Demplot dan diseminasi teknologi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru sehingga mampu merangsang pertumbuhan kelembagaan petani serta meningkatkan kapasitasnya.

Pada Tahun 2023 jumlah Kelompok Tani di Kota Banjarbaru berjumlah 300 Kelompok Tani yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru, dan jumlah yang naik kelas (score) berjumlah 205 kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30. Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Kelompok yang naik kelas /skor

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas (skor)
1.	Liang Anggang	64	51
2.	Landasan Ulin	72	48
3.	Cempaka	81	48
4.	Banjarbaru	85	58
	J u m l a h	300	205

Sumber data dari Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa, dari 300 jumlah kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru jumlah yang meningkat kapasitasnya atau naik kelas (score) adalah sebesar 205 Kelompok. Dimana Kelompok tani tersebut tersebar diseluruh Kecamatan Kota Banjarbaru.

Tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/score ditargetkan sebesar 68 % dan terealisasi 68,33 % dengan capaian

kinerja sebesar 100,48 %. Hal ini didapat dari jumlah seluruh kelompok tani yang ada di kota Banjarbaru sebesar 300 kelompok tani, sedangkan dari jumlah kelompok tersebut yang naik kelas (score) berjumlah 205 kelompok, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam upaya meningkatkan score / kapasitas kelembagaan kelompok tani, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dibantu dengan para penyuluh pertanian di lapangan yang merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan petani yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru bersama sama melakukan pembinaan/penyuluhan/bimtek/adopsi dan inovasi teknologi maupun penyampaian program-program terkait kepada Kelompok Tani /kelembagaan petani sehingga kelompok tani mampu mengembangkan usahanya dan menjadi kelompok tani yang mandiri dan meningkat kapasitasnya (score).

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021

Tabel31. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score	%	65,72	100	68,13	101,69	68,33	100,48

Berdasarkan Tabel 31 diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas/Score Tahun 2023 (sebesar 68,33 %), jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 (sebesar 68,13%) maka terjadi kenaikan sebesar 0,20 %, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (sebesar 65,72 %) maka terjadi kenaikan sebesar 2,61 %. Hasil ini tercapai berkat kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru beserta jajarannya khususnya Bidang Penyuluhan dengan semua UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di seluruh Kota Banjarbaru beserta dengan

seluruh penyuluh yang ada dilapangan dengan meningkatkan kerja nya untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan langsung ke kelompok tani baik secara teknis maupun administrasi kelompok taninya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 32. Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas(Score)	%	68,33	100,48	N	N	N	N

Berdasarkan Tabel 32 diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas (Score) Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar 68,33 % (capaian 100,48 %). Untuk realisasi Provinsi data tidak bisa didapatkan karena perbedaan IKU yang digunakan, sedangkan untuk realisasi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin belum didapat (masih dalam perhitungan).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Renstra Tahun 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score	%	68,33	100,48 %	68 %	20 %

Berdasarkan Tabel 33 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score Tahun 2023 adalah 68,33% dengan capaian kinerja 100,48%, jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 68 % maka target Renstra Tahun 2023 telah tercapai atau dengan capaian sebesar 100,48%. Jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 20 %, maka Kota Banjarbaru lebih tinggi. Karena secara Nasional jumlah persentase penyuluh masih kurang dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan dan jumlah Kelompok Tani yang ada di seluruh Indonesia atau satu penyuluh wilayah binaannya merangkap beberapa desa dan kelurahan, sehingga pembinaan peningkatan kelembagaan petani masih rendah. Sedangkan Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada semua kelurahan dibina oleh masing-masing penyuluh pendamping sehingga kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (kelas/score) realisasinya lebih tinggi. Namun karena SDM Pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, maka sangat perlu dukungan manajemen peningkatan kualitas SDM yang ada baik melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pemenuhan sarana prasarana penyuluhan lainnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Program Penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 15,06%. Ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran penggunaan anggaran pada Program/kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas/Score. Pada Tabel 34 terlihat Pagu anggaran sebesar Rp. 2.110.845.500, realisasi sebesar Rp. 1.803.008.546 dengan capaian 85,42 %. Pada Tabel 29 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 100,48% . Dari kedua Tabel tersebut terlihat realisasi capaian kinerja lebih tinggi 15,06 % dari pada realisasi capaian anggaran.

Program utama yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score adalah Program Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru dan Cempaka. Beberapa kegiatan dalam program tersebut dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik kelas (Score), diantaranya pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan rapat-rapat dengan kelompok tani/gapoktan serta fasilitasi pembentukan Badan Usaha milik Petani, yang mana semua kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat petani di Kota Banjarbaru.

Selain Program tersebut diatas ada pula dukungan dari pemerintah pusat berupa dana BOP (Biaya Operasional Penyuluh), paket data untuk admin, dan bantuan transport yang diterima penyuluh pertanian setiap bulan untuk mendukung kinerja mereka di lapangan dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok tani dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi manajemen korporasi petani berupa pemberian penghargaan kepada insan pertanian tingkat Provinsi, pendampingan manajemen korporasi berupa bimbingan teknis bagi anggota KWT (Kelompok Wanita Tani), Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan tingkat provinsi dan pertemuan teknis Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Metodologi Penyuluhan dan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi Pengelola P4S, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya melalui peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya melalui demplot penyuluh swadaya di kelurahan Sungai Ulin, dan fasilitasi Pakaian Lapangan bagi seluruh Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Untuk tercapainya sasaran indikator kinerja persentase jumlah poktan yang naik kelas/score ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan, diantaranya :

- a. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja penyuluh baik tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan secara rutin dan berjenjang.
- b. Melaksanakan pembinaan secara intensif kelembagaan kelompok tani.
- c. Revitalisasi kelompok Tani
- d. Memberikan target kepada semua penyuluh dalam pembinaan kelompok tani

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Tercapainya sasaran indikator kinerja persentase jumlah poktan yang naik kelas/score didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Sebagai Indikator Utama Penyuluh Pertanian adalah meningkatkan Kelas Kelompok Tani atau Score Kelompok Tani yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pertanian.
2. Adanya tambahan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan sehingga meningkatkan pendampingan Kelompok Tani.

Dukungan dari pemerintah pusat berupa dana BOP (Biaya Operasional Penyuluh), paket data untuk admin dan bantuan transport yang diterima penyuluh pertanian setiap bulan untuk mendukung kinerja mereka di lapangan dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok tani dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi manajemen korporasi petani berupa pemberian penghargaan kepada insan pertanian tingkat Provinsi, pendampingan manajemen korporasi berupa bimbingan teknis bagi anggota KWT (Kelompok Wanita Tani), Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan tingkat provinsi dan pertemuan teknis Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Metodologi Penyuluhan dan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi Pengelola P4S, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya melalui peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya melalui demplot penyuluh swadaya di kelurahan Sungai Ulin, dan fasilitasi Pakaian Lapangan bagi seluruh Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang di hadapi dalam pencapaian kinerja

- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan usahatani, sehingga mempengaruhi dalam pencapaian penambahan jumlah kelompok tani binaan.
- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani dalam upaya meningkatkan kenaikan kelas kelompok tani secara berjenjang.
- Tingkat pendidikan petani yang masih rendah, sehingga menyebabkan lambatnya peningkatan inovasi dalam usahatani.

RENCANA TINDAK LANJUT

- Perlunya dilaksanakan bimbingan teknis secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kemampuan kenaikan kelas kelompok tani oleh penyuluh pendamping.
- Pendampingan berkelanjutan oleh penyuluh pendamping dalam penerapan inovasi dalam usaha tani.
- Bimbingan pemberdayaan kelompok tani yang lebih baik dengan pembentukan badan hukum sehingga legalitas kelompok tani secara hukum dapat dipertanggung jawabkan
- Peningkatan media informasi melalui Media Sosial berupa siaran Radio, FB, IG, Youtube, Pameran, Instagram, Spanduk, Foster dan lain-lain dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan petani dalam mengembangkan usahatani.
- Peningkatan koordinasi kepada petani tentang program pemerintah yang bisa melindungi dan menambah permodalan usahatani seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan AUP (Asuransi Usaha Tani Padi).
- Penumbuhan Petani Milenial untuk regenerasi jumlah petani yang semakin berkurang

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Untuk mencapai sasaran meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani pada Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 34. Tabel Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Penyuluhan Pertanian	2.110.845.500	1.803.008.546	307.836.954	85,42
	Jumlah	2.110.845.500	1.803.008.546	307.836.954	85,42

Pada Tabel 34 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyuluhan Pertanian adalah sebesar Rp. 2.110.845.500, realisasi sebesar Rp. 1.803.008.546,- dengan capaian 85,42%.

3.2.5. Kepala Bidang Penyuluhan

Pada Bidang Penyuluhan (Esselon III) ada 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang ingin di capai, yaitu :

1	Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani	unit	5	5	100%
---	--	--	------	---	---	------

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan evaluasi Tingkat Kota sehubungan dengan peningkatan kelas / skor kelompok tani.
- ❖ Peningkatan media informasi melalui siaran radio, FB, IG, Youtube, Pameran, Instagram, Spanduk, Foster dan lain-lain dalam rangka peningkatan kompetensi SDM penyuluh.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi :

- ❖ Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan yang dimiliki oleh petani, sehingga mempengaruhi dalam pencapaian penambahan jumlah kelompok petani .
- ❖ Masih rendahnya kemampuan petani untuk menerapkan teknologi yang meningkatkan Produksi Petani

RENCANA TINDAK LANJUT

- ❖ Melaksanakan bimbingan teknis secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kemampuan kelas kelompok tani.

- ❖ Peningkatan bimbingan pemberdayaan kelompok tani.

3.3 Capaian Kinerja Eselon IV

Realisasi capaian kinerja Eselon IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 36. Realisasi Capaian Kinerja Eselon IV

1	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian	Jumlah kelembagaan petani pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	4	4	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pembentukan badan hukum milik kelompok tani	Jumlah badan usaha milik petani yang dibentuk	unit	3	3	100%
3	Terlaksananya penyediaan sarpras media informasi penyuluhan	Jumlah sarana prasarana penyuluhan pertanian	unit	6	6	100.00%

Dari Tabel diatas, beberapa upaya yang dilaksanakan, hambatan dan rencana tindak lanjut nya adalah sebagai berikut :

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

- ❖ Melaksanakan sosialisasi dan bimtek untuk penyuluh dan petani dalam rangka meningkatkan kompetensi dan penguatan kelembagaan kelompok tani.
- ❖ Melaksanakan Demplot Teknologi percontohan komoditas unggulan di BPP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam rangka mengembangkan inovasi teknologi pertanian.
- ❖ Melaksanakan study tiru ke kelembagaan ekonomi petani yang sudah berbadan hukum.
- ❖ Mengadakan pelatihan/penyuluhan kepada para petani dan penyuluh se Kota Banjarbaru (Pelaksanaan AUDP dan KUR).
- ❖ Mengadakan beberapa sosialisasi yang berhubungan dengan petani/penyuluh maupun masyarakat lewat siaran radio yang bekerjasama dengan Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

HAMBATAN

- ❖ Masih adanya sebagian data kelembagaan petani yang sudah tidak akurat lagi.
- ❖ Sebagian SDM Kelompok Tani belum siap dalam penguatan kelembagaan yang berbadan hukum.
- ❖ Masih banyak bimtek dan pelatihan yang diperlukan penyuluh dan petani dalam peningkatan kapasitasnya.
- ❖ Tidak mengenanya sasaran/pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan informasi pertanian.
- ❖ Minimnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana media penyuluhan informasi pertanian.
- ❖ Kurangnya tenaga SDM pada seksi Sarana dan Prasarana penyuluhan Informasi Pertanian yang menguasai IT.

RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif tentang perlunya penguatan kelembagaan.
- b. Perlunya dukungan dana untuk revitalisasi data kelembagaan kelompok tani dan untuk pelaksanaan sosialisasi/bimtek bagi penyuluh/petani.
- c. Mengadakan penyuluhan /sosialisasi penyuluhan informasi yang tepat sasaran.
- d. Dukungan penganggaran untuk kegiatan pelatihan untuk petugas IT.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2022 memuat laporan pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang dituangkan menjadi 5 (lima) target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program, kegiatan ataupun sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya, akan tetapi masih bisa dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Hasil yang telah dicapai Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

a) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Esselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,30	90,20	99,89%	AA (sangat memuaskan)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	405,54 ton	450,79 ton	111,16 %	AA (sangat memuaskan)
3.	Meningkatnya Pengembangan Sarana Pertanian /Pernakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7.082,69 ton	4.525,81	63,90%	B (Baik)
4	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2.879.000 ekor	2.867.877 ekor	99,61 %	AA (sangat memuaskan)
5.	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas (score)	68 %	68,33 %	100,48%	AA (sangat memuaskan)

b). CAPAIAN KINERJA Esselon III

Realisasi Capaian Kinerja Eselon III Bidang Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	capaian
1.	Peningkatan Penyaluran Pangan pokok sesuai dengan kebutuhan Daerah	Persentase Cakupan pangan yang tersalurkan	%	25	26,93	107,7%
2.	Peningkatan	Persentase	%	0.036	0.568	1577,8%

	pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kota	pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah				
3	Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Angka konsumsi pangan	Kkal/perkapita/hari	1792.0	2,105	117,5%
4	Peningkatan keamanan pangan melalui pengujian PSAT	Persentase rekomendasi PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang diterbitkan	%	100	100	100%

CAPAIAN KINERJA Esselon III Bidang Perikanan

1	Peningkatan Usaha pembudidaya ikan skala kecil	Persentase Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah	%	10	43,23	432%
2	Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	Persentase sumberdaya perikanan yang dapat diusahakan	Kawasan	1	1	100%
3.	Peningkatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi	Jumlah produksi usaha poklaksar yang dinyatakan berkualitas dan aman	ton	118,6	173,8	147 %

	usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil					
--	--	--	--	--	--	--

Capaian Kinerja Esselon III Bidang Pertanian dan Perkebunan

1.	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Luas lahan yang di garap	ha	30	30	100%
2.	Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik tanaman	Persentase Cakupan pemanfaatan SDG tanaman	%	51	51	100%
3.	Peningkatan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan	%	5	5	100%
		Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan	%	10	10	100%
		Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan	%	0.0009	0.0009	100%

Capaian Kinerja Esselon III Bidang Peternakan

Peningkatan kualitas bibit ternak	Persentase jumlah kelahiran ternak yang berkualitas	%	35	41	117.0%
peningkatan pengembangan ternak	Persentase ternak bantuan yang berproduksi	%	60	75	125.0%
Peningkatan pelayanan penyakit zoonosis dan	Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit	ekor	100	300	300%

penyakit menular ternak	menular ternak yang tertangani				
Peningkatan pembinaan tempat pemotongan hewan dan tempat pemotongan unggas)	Persentase tempat pemotongan yang dibina	%	10	10	100%

Capaian Kinerja Esselon III Bidang Penyuluhan

1	Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani	unit	5	5	100%
---	--	--	------	---	---	------

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta di dalamnya.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan pihak terkait (Lembaga Pendidikan/Akademis) yang menangani PPH konsumsi karena terbatasnya SDM.
2. Merubah pola konsumsi masyarakat dengan lebih gencar mengadakan sosialisasi/edukasi/advokasi diversifikasi konsumsi pangan, sehingga

semakin tinggi pola konsumsi semakin berkualitas dan beragam makanan yang dikonsumsi.

3. Meningkatkan peran dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Banjarbaru dalam hal diversifikasi konsumsi pangan.
4. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul untuk setiap aktivitas budidaya perikanan (kolam, jaring apung dan karamba).
5. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha perikanan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian dalam melakukan aktivitas budidaya perikanan.
6. Meningkatkan peran dan dukungan pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal pemberian/bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan.
7. Pembuatan irigasi tersier dan rehabilitasi jalan usaha tani.
8. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) secara tepat guna dan ramah lingkungan dengan pestisida organik.
9. Penerapan sistem pertanaman Jejer Legowo dan Tanam Padi Tugal. Jejer legowo suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 perhektar dan juga memperlancar sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman dapat berfotosintesis. Tanam padi tugal dengan cara di tugal jika curah hujan masih sedikit.
10. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Banjarbaru (bantuan berupa subsidi pupuk, Alat mesin pertanian dan bibit unggul).
11. Merubah pola pemeliharaan peternak ke arah ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi, mengingat lahan peternakan di Kota Banjarbaru yang semakin sempit.
12. Memperbanyak bantuan pengolahan pakan ternak berupa alat pencacah rumput dan drum untuk pengolahan silase, sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi bau.

13. Perlunya dilaksanakan bimbingan teknis secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kemampuan kenaikan kelas kelompok tani oleh penyuluh pendamping.
14. Pendampingan berkelanjutan oleh penyuluh pendamping dalam penerapan inovasi dalam usaha tani.
15. Bimbingan pemberdayaan kelompok tani yang lebih baik dengan pembentukan badan hukum sehingga legalitas kelompok tani secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.
16. Peningkatan media informasi melalui Media Sosial berupa siaran Radio, FB, IG, Youtube, Pameran, Instagram, Spanduk, Foster dan lain-lain dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan petani dalam mengembangkan usahatani.
17. Peningkatan koordinasi kepada petani tentang program pemerintah yang bisa melindungi dan menambah permodalan usahatani seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan AUP (Asuransi Usaha Tani Padi).
18. Penumbuhan Petani Milenial untuk regenerasi jumlah petani yang semakin berkurang.

LAMPIRAN